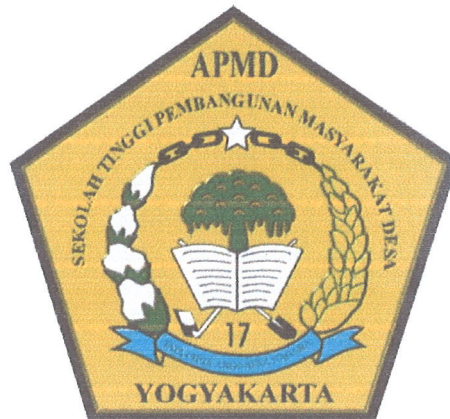


SKRIPSI

**PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA
RINTISAN BUDAYA**

(Studi di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta)



Oleh:

SRI AYU MAGI TALO

21520046

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBAKNGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL
PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA
RINTISAN BUDAYA

(Studi di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan
Strata Satu (S1)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBAKNGUNAN MASYARKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembakngunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumad
Tanggal : 25 Juli 2025
Waktu : 11.00 s.d Sselesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

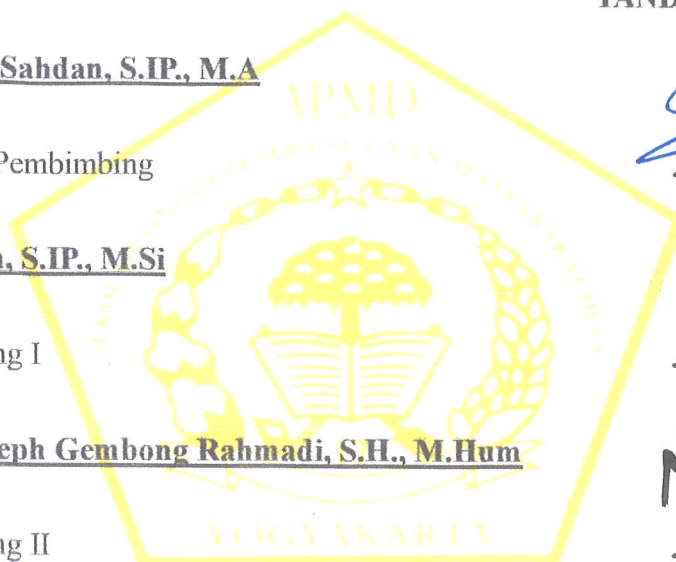
Ketua Penguji/Pembimbing

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Penguji Samping I

Dr. Raden Yoseph Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum

Penguji Samping II



.....
.....
.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Ayu Magi Talo
NIM : 21520046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA RINTISAN BUDAYA (Studi di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2025



Sri Ayu Magi Talo

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sri Ayu Magi Talo
NIM : 21520046
Telepon : 081246249174
Email : Sriayu782001@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA RINTISAN BUDAYA (Studi di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan




Sri Ayu Magi Talo

21520065

HALAMAN PERSEMBAKHAN

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Karena atas berkat dan Rahmat-nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasi penulis karean berkat doa dan dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada Tuhan Yesus Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Teristimewa Kepada pahlawan, cinta pertama penulis, referensi hidup terbaik selama penulis hidup hingga saat ini yakni, **Bapak Moto Dunga Pawolung** dan **Ibu Meriana Malo** yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Keduanya merupakan merupakan sosok orang tua yang berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam Skripsi ini adalah buah dari kerja keras yang disertai doa dari kedua orang tuaku. Skripsi ini adalah persembahkan dari anak kalian yang saat ini sudah mulai tumbuh dewasa. Terimakasih atas nasehat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah kaki penulis. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah bapak ibu berikan buat penulis.
3. Terimakasih juga kepada pihak keluarga dari keluarga bapa {Lolina} dan pihak keluarga dari mama [wejewa] yang mana selalu meberikan Doa,dukungan dan nasehat, kepada penulis.

MOTTO

Kejarlah itu sebab Tuhan Yesus akan selalu menolong kita”

(Yesaya 14:10)

“Bouu kullisako payilli. Muu kolege hasilana

Takka bouu mawwo koo. Daiki pakolemu, monno daima pautumu”

“Kalau kau kerja keras, kau dapat hasil; kalau kau malas, kau dapat rugi.”

“Kerja keras merupakan kunci utama dalam meraih tujuan dan keberhasilan.

Sebaliknya, kemalasan bukan hanya membuat seseorang tidak menghasilkan apa-

apa, tetapi juga dapat membakwa kerugian yang nyata.”

(Moto Dunga Pawolung)

“Tidak Masalah seberapa lambakt kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti.”

“kesuksesan bukan ditentukan oleh kecepatan, tetapi oleh ketekunan dan konsistensi untuk terus melangkah.”

Confucius (Kong Hu Cu)

"hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan."

Najwa Sihab

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA RINTISAN BUDAYA (Studi di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta dan juga Dosen Pembimbing penulis yang sudah berbesar hati menerima penulis sebagai anak bimbingan, yang serta membakntu dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si. selaku Dosen penguji satu saya, yang sudah membakntu dan membimbing penulis serta sumbakngan pemikiran,

pengetahuan dan gagasannya.

5. Bapak Dr. Raden Yoseph Gembong Rahmadi, SH., M.Hum. selaku Dosen penguji Dua saya, yang sudah meluangkan waktunya membakntu dan membimbing penulis serta menyumbakngkan pemikiran, pengetahuan dan gagasan-gagasannya.
6. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani, memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimbakh ilmu di kampus Sekolah Desa”APMD”Yogyakarta Tinggi Pembakngunan Masyarakat
7. Pemerintah Kalurahan Wijireji yang telah bersedia dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Dan kepada para masyarakat Kalurahan Wijireji yang telah bersedia untuk menjadi narasumber penulis ucapkan limpah terima kasih.
8. Kepada kaka saya dan adik-adik saya terkasih yakni, Lidy Lali Tewo, Dea Hana Tamo Ina dan Richardo Tamo Ama yang selalu mendukung dan mensuport mendokan penulis yang terbaik.
9. Kepada Kak Mario, Bung Adio dan sahabat- sahabat dekat saya yang telah membantu dan selalu mensuport penulis dari awal hingga terselesainya skripsi penulis, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAKHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAKR	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Peneitian	8
F. Literatur Review	8
G. Kerangka Konseptual	12
1. Pemerintah Kalurahan	12
2. Kalurahan Budaya	22
3. Kalurahan Rintisan Budaya	33
H. Metode Penelitian	39

1. Jenis Penelitian.....	39
2. Unit Analisis Data	40
3. Teknik Pengumpulan Data	41
4. Teknik Analisi Data.....	44
BAB II RINTISAN BUDAYA DI KALURAHAN WIJIREJO	47
A. Pemerintah Kalurahan	47
B. Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo	50
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENGEMBANGKAN KALURAHAN RINTISAN BUDAYA.....	62
A. Program pemerintah kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di kalurahan wijirejo	62
B. Pemanfaatan anggaran dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo	71
C. Kebijakan pemerintahan Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo	78
D. Aturan terkait dengan rintisan budaya di Kalurhan Wijirejo	84
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian.....	41
Tabel 2. 1 Pemerintahan Kalurahan Wijirejo	48
Tabel 2. 2 Bidang Pengurus Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo.....	52

DAFTAR GAMBAKR

Gambakr 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wijirejo.....	49
Gambakr 2. 2 Struktur Organisasi Rintisan Budaya	51
Gambakr 2. 3 Kegiatan Upacara Adat.....	55
Gambakr 2. 4 Kegiatan Upacara Tradisi Daur Hidup	56
Gambakr 2. 5 Kesenian dan Permainan Rakyat.....	57
Gambakr 2. 6 Kesenian dan Permainan Rakyat.....	58
Gambakr 2. 7 Bahasa, Aksara dan Sastra.....	59
Gambakr 2. 8 Penataan Ruang & Bangunan Serta Warisan Budaya	61

INTISARI

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh status keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Keistimewaan ini mencakup lima bidang strategis, salah satunya yaitu Kebudayaan. Sebagai bentuk nyata pelaksanaan UU Keistimewaan dalam bidang kebudayaan, lahirlah Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kalurahan/Kelurahan Budaya. Salah satu program unggulannya adalah pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya, yang menjadi motor utama dalam upaya revitalisasi budaya berbasis masyarakat dalam mencapai Kalurahan Mandiri Budaya.

Kalurahan Wijirejo telah ditetapkan sebagai Kalurahan rintisan budaya sejak tahun 2023 oleh pemerintah kabupaten dengan tujuan mengembangkan potensi budaya lokal, namun hingga kini Pemerintah Kalurahan belum mampu memanfaatkannya secara optimal, khususnya dalam pelestarian sanggar tari. Kurangnya dukungan, perhatian, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat juga menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat tentang status Kalurahan rintisan budaya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan sejauh mana peran Kalurahan Wijirejo dalam memberikan manfaat sosial dan mendorong pengembangan kebudayaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki objek penelitian yang bersifat alami

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo dilaksanakan secara terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan dengan dasar regulasi yang jelas, seperti Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Lurah Nomor 48 Tahun 2023. Pemerintah Kalurahan membentuk struktur kepengurusan khusus untuk mengelola berbagai bidang budaya mulai dari seni pertunjukan, kuliner, warisan budaya, hingga pengobatan tradisional dengan dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan DIY, Dana Kalurahan, dan APBDes. Kegiatan seperti festival budaya, pelatihan kesenian, dan pelestarian adat digelar secara rutin untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni dan melibatkan generasi muda. Pemerintah juga memfasilitasi pendataan Nomor Induk Kesenian (NIK) agar kelompok seni dapat mengakses dana khusus, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan wisata berbasis budaya. Setiap pedukuhan diwajibkan memiliki kelompok seni yang aktif, serta mendapat dukungan fasilitasi dan pendampingan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa KKN dalam pelestarian budaya melalui kegiatan edukatif menunjukkan sinergi lintas sektor. Meski ada keterbatasan anggaran di beberapa bidang, kebijakan yang sistematis dan berbasis kearifan lokal ini memperkuat identitas budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Kalurahan Wijirejo sebagai contoh pengembangan budaya yang adaptif dan berdaya saing.

Kata Kunci: Pemerintah Kalurahan, Pengembangan, Rintisan Desa Budaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, mulai dari bahasa, adat istiadat, seni, hingga tradisi yang berkembang di setiap wilayah. Keanekaragaman budaya ini menjadi salah satu kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh status keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Keistimewaan ini mencakup lima bidang strategis, yaitu tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembakgaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Dalam konteks penguatan budaya, keistimewaan ini memberikan ruang dan kewenangan khusus bagi DIY untuk merancang dan mengelola sistem sosial budaya, termasuk di tingkat kalurahan, sebagai bagian penting dari struktur sosial yang masih kuat mengakar.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalurahan di DIY memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari Kalurahan-Kalurahan lain di Indonesia. Keberadaan Kalurahan sebagai entitas pemerintahan lokal sekaligus penjaga nilai-nilai budaya tradisional, menjadikan Kalurahan bukan sekadar unit administratif, tetapi juga sebagai ruang hidup kebudayaan yang dinamis. Dalam sistem ini, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga menjadi penggerak utama

revitalisasi budaya lokal, melalui penguatan kelembagaan budaya yang ada di tingkat Kalurahan.

Sebagai bentuk nyata pelaksanaan UU Keistimewaan dalam bidang kebudayaan, lahirlah Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kalurahan/Kelurahan Budaya. Salah satu program unggulannya adalah pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya, yang menjadi motor utama dalam upaya revitalisasi budaya berbasis masyarakat dalam mencapai Kalurahan Mandiri Budaya.

Melalui program ini, Kalurahan didorong untuk menjadi pusat pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Pemerintah Kalurahan berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi budaya yang ada, memfasilitasi organisasi budaya masyarakat, serta menyediakan dukungan berupa anggaran, pelatihan, dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, pemerintah Kalurahan juga diharapkan menyusun regulasi internal, seperti peraturan kalurahan, guna memberikan payung hukum bagi kelangsungan organisasi budaya yang ada.

Dalam konteks ini, organisasi-organisasi budaya di tingkat kalurahan menjadi garda depan dalam menjaga dan mengembangkan tradisi, seni, bahasa, serta kearifan lokal, yang selama ini menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator, mendorong partisipasi masyarakat, membakngun jejaring antar-kalurahan, serta memperkuat sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Rintisan Kalurahan Budaya di DIY bukanlah proyek instan, melainkan sebuah proses bertahap yang bersifat partisipatif dan

berkelanjutan. Program ini diawali dengan pemetaan potensi budaya Kalurahan, termasuk sumber daya manusia, kesenian lokal, sejarah Kalurahan, praktik tradisi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan Kalurahan-Kalurahan yang siap dan berkomitmen untuk mengikuti proses rintisan.

Selanjutnya, proses fasilitasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, kelompok seni, generasi muda, dan pemerintah Kalurahan. Fasilitator budaya dari Dinas Kebudayaan membakntu Kalurahan menyusun profil budaya, yang memuat gambakran umum budaya Kalurahan, visi-misi pengembangan, serta rencana tindak lanjut. Dalam tahap ini, nilai-nilai lokal mulai dikuatkan kembakli melalui dialog, pelatihan, pendokumentasian, hingga pelaksanaan kegiatan budaya yang melibatkan seluruh warga.

Kalurahan yang menjalani proses rintisan akan mendapatkan pendampingan, termasuk dalam hal penguatan kelembakgaan budaya, pengembangan ekonomi kreatif, penyelenggaraan event budaya Kalurahan, serta revitalisasi ruang-ruang budaya. Semua proses ini diarahkan untuk membentuk Kalurahan yang mampu mengelola potensi budayanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Program Rintisan Kalurahan Budaya membakwa pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up), menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama kebudayaan. Rintisan bukan hanya pelestarian, tetapi juga transformasi budaya tidak dibekukan, melainkan dihidupkan dan dikembakngkan sesuai zaman. Dengan demikian, proses Rintisan Budaya di DIY menjadi contoh

nyata bagaimana kebijakan budaya yang berbasis masyarakat dapat memperkuat identitas lokal, menumbuhkan solidaritas sosial, serta membuka jalan menuju pembakngunan berkelanjutan berbasis kebudayaan.

Pemerintah Kalurahan, sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pengembangan Kalurahan rintisan budaya. Kalurahan atau kelurahan yang berhasil melewati tahapan-tahapan ini dan mengembangkan potensi budaya mereka akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah Provinsi DIY. Pengakuan ini berupa status Kalurahan/kelurahan budaya yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Status ini bukan hanya menunjukkan keberhasilan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan, tetapi juga sebagai bukti bahwa Kalurahan atau kelurahan tersebut berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal.

Dengan demikian, Kalurahan rintisan budaya di DIY merupakan sebuah konsep yang menggabungkan pelestarian kebudayaan dengan pembakngunan sosial dan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah DIY berharap dapat menciptakan Kalurahan-Kalurahan yang tidak hanya kaya akan nilai-nilai budaya, tetapi juga berdaya secara ekonomi. Kalurahan ini berfungsi sebagai tempat untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal, serta sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat Kalurahan agar dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi kebudayaan mereka. Sebagai bagian dari proses menuju Kalurahan budaya, Kalurahan rintisan budaya ini

memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan dan memajukan warisan budaya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui revitalisasi budaya ini, Yogyakarta tidak hanya berupaya menjaga warisan budaya masa lalu, tetapi juga mentransformasikannya menjadi kekuatan sosial dan ekonomi masa kini dan masa depan. Penguatan organisasi budaya di kalurahan menjadi bagian penting dalam strategi membangun masyarakat yang berakar kuat pada budaya, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Ini adalah wujud konkret dari semangat dari *Kalurahan, oleh Kalurahan, dan untuk Kalurahan* dalam menjaga keberlanjutan keistimewaan Yogyakarta melalui budaya.

Kalurahan Wijirejo sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sebagai Kalurahan rintisan budaya sejak tahun 2023, untuk dapat mengembangkan budaya-budaya lokal sebagai potensi Kalurahan. Akan tetapi pemerintahan wijirejo belum mampu memanfaatkan potensi-potensi budaya lokal terutama dalam mendorong pelestarian sanggar tari. Sanggar tari palatri yang ada di padukuhan gesikan IV merupakan sanggar yang dibentuk oleh sekelompok warga padukuhan gesikan IV guna melestarikan budaya tarian yang ada di padukuhan tersebut. Dalam pembentukan sanggar tari tersebut didasarkan oleh inisiatif masyarakat padukuhan untuk terus melestarikan budaya lokal.

Demikian juga, Sanggar palatri saat ini sudah banyak meraih berbagai penghargaan baik dalam tingkat Kalurahan maupun tingkat kabupaten. Sanggar tari ini sudah banyak menampilkan seni tarinya dalam beberapa even seperti kegiatan festival, perlombakan dan masih banyak lagi kegiatan-

kegiatan yang di ikuti oleh sanggar palatri sendiri, sampai memenangkan banyak perlombakan, namun penghargaan yang di terima tidak semata-mata di terima langsung oleh sanggar palatri melainkan di berikan kepada kalurahan, dalam pelaksanaan tersebut pemerintah tidak ikut andil, kurang memperhatikan dan tidak memfasilitasi sangar tersebut, yangg terjadi pengurus sanggar yang lebih banyak mengeluarkan anggaran pribadi demi keberlangsungan sanggar palastri ini.

Selain itu, belum tercipta komunikasi yang optimal antara pengurus Kalurahan, pengelola kalurahan rintisan budaya dengan masyarakat sekitar sehingga banyak masyarakat tidak tahu isu yang berkembang mengenai kalurahan rintisan budaya. Namun yang lebih menarik untuk penelitian adalah sejauh mana Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dalam upaya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat Kalurahan pada kegiatan rintisan Kalurahan budaya untuk mendorong berkembangnya kebudayaan yang ada di Kalurahan sebagai pedoman dasar bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya.

Berdasarkan urain diatas bahwa peniliti tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam terkait pengembangan budaya lokal, terutama dalam mendukung pengembangan budaya lokal, baik dari pemerintah Kalurahan maupun masyarakat. Oleh karena peneliti mengangkat topik dengan judul PEMERINTAHAN KALURAHAN DALAM MENGEMBANGKAN KALURAHAN RINTISAN BUDAYA.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni ingin meliha peran pemerintah Kalurahan dalam pengembangan rintisan budaya dari:

1. Program pemerintah kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di kalurahan wijirejo kapanewon pandak kabupaten bantul
2. Pemanfaatan anggaran dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
3. Kebijakan pemerintahan Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
4. Aturan terkait dengan rintisan budaya di Kalurhan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemerintah kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di kalurahan wijirejo kapanewon pandak kabupaten bantul” ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah Menggambarkan Pemerintahan Kalurahan Dalam Mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui program pemerintah dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya yang ada di Kalurahan Wijirejo
2. Untuk mengetahui pemanfaatan anggaran dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya yang ada di Kalurahan Wijirejo
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintahan Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya yang ada di Kalurahan Wijirejo
4. Untuk aturan terkait rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

F. Literatur Review

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Triwardani dkk, (2014) dengan judul penelitian *Implementasi Kebijakan Kalurahan Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahapan implementasi, kebijakan penetapan Kalurahan budaya sebagai model pelestarian budaya lokal perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan tata kelola Kalurahan budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestari budaya lokal tersebut (Triwardani & Rochayanti, 2014) .
2. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Wahyu Wijaya (2024) dengan judul penelitian *Pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Di Kalurahan Gading, Playen, Gunungkidul*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

pengembangan budaya di Kalurahan Gading masih terbatas, dengan upaya menjaga dan mengaktifkan kembali kegiatan kebudayaan yang belum maksimal. Kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia dan anggaran minim, yang menghambat pemberdayaan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar pemberdayaan masyarakat berjalan optimal (Satria Wahyu Wijaya, 2024)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kalurahann (2023) dengan judul penelitian *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya Menjadi Kalurahan Budaya Di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul diwujudkan melalui pengembangan 5 (lima) aspek yaitu: adat dan tradisi, seni dan budaya, arsitektur dan tata ruang, permainan anak, kuliner dan keterampilan. (a) Melakukan pendataan dan penataan kembali format rintisan budaya agar lebih menarik dan lebih baik yaitu dengan mensosialisasikan sekaligus menyamakan persepsi tentang kegiatan Rintisan Kalurahan Budaya, (b) Mengoptimalkan kegiatan atau pementasan kebudayaan untuk menarik kunjungan wisatawan serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memiliki akan adat dan budaya yang ada, dan (c) Mengoptimalkan jejaring kerja dan pembagian peran dalam pengelolaan kegiatan Rintisan Budaya mencakup seluruh stakeholder yang ada terdiri dari Kepala Kalurahan,

Pamong Kalurahan, tokoh seni dan budaya, tokoh agama dan semua warga masyarakat yang ada di Kalurahan Nglindur, (2) Faktor pendukung partisipasi masyarakat adalah sanggar tari, alat musik dan kostum. partisipasi masyarakat pada hubungan masyarakat dengan pihak pengelola Rintisan Budaya di Kalurahan Nglindur yang sangat erat dan aktif dalam segala hal untuk mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya yang akan dibawa maju ke tahap yang lebih tinggi yaitu Kalurahan Budaya (Desem, 2023).

4. Penelitian yang dilakukan oleh T. Prasetyo Hadi Atmoko (2018) dengan judul penelitian *Implementasi Kebijakan Kalurahan Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Kalurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalurahan Sendangmulyo memiliki potensi budaya seperti gamelan tabuh, seni tari, jathilan dan encling, thek-theke, gejug lesung, kethoprak, kriya dan kuliner, serta merti Kalurahan. Implementasi kebijakan Kalurahan budaya berdasarkan penilaian Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kalurahan Sendangmulyo masuk dalam kategori Kalurahan budaya maju. Faktor kekuatan Kalurahan Sendangmulyo adalah potensi budaya dan dukungan masyarakat. Kelemahan sumber daya manusia yang kurang terampil, kelembagaan yang kurang memahami fungsinya, serta fasilitas yang kurang memadai menjadi kelemahan, begitu pula pemahaman budaya dan keterlibatan generasi muda yang masih kurang menjadi faktor ancaman. Peluang yang dapat dikembangkan agar Kalurahan Sendangmulyo dapat menjadi destinasi wisata budaya. Dalam mengatasi kelemahan sumber

daya manusia, kelembakgaan, dan sarana prasarana di Kalurahan Sendangmulyo, Pemerintah Kalurahan dengan dukungan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY melakukan peningkatan motivasi, pengetahuan, dan peran serta masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan kelembakgaan pengelolaan Kalurahan melalui peningkatan pengelolaan, budaya Kalurahan dan memberikan dana untuk menyelenggarakan wisata budaya bertajuk (Atmoko, 2018)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dkk, (2023) dengan judul penelitian *Rintisan Kalurahan Wisata Budaya melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal dan Pemanfaatan Digital Marketing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Secara kelembakgaan, Lembakga Adat Mapur (LAM) memiliki tugas menjaga dan memelihara tradisi dan keyakinan leluhur serta menjaga kelestarian hutan adat. Berdasarkan hasil survei terdapat permasalahan internal maupun eksternal. Masalah internal meliputi kemandegan pranata sosial, system keyakinan dalam hal perkawinan (keturunan), dan identitas yang terancam. Secara eksternal lebih difokuskan pada konflik tenurial yang telah berlangsung sejak satu dekade terakhir yaitu konflik nuansa sengketa lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan Urang Lom, sehingga mengancam kelestarian kearifan lokal di kawasan tersebut. Program kegiatan PkM Dosen bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengelola potensi ekowisata dengan mengangkat kearifan lokal. Kegiatan tersebut berupa Workshop Pengembangan Wisata Bebasis Kearifan Lokal, Branding dan Pendampingan pemanfaatan sosial Media

dan Digital Marketing program pengembangan tempat edukasi Tanaman Obat. Kegiatan Pengabdian ini diharapkan mampu menjadi solusi dan memberikan dampak positif bagi proses Dusun Air Abik menjadi Kalurahan Wisata (Yusuf et al., 2023).

Dari beberapa kajian literatur review yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan judul kajian yang bermacam-macam, perbedaan secara mendasar yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian, ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Sedangkan kesamaannya terletak pada metode penelitian kualitatif dan ruang lingkup kajian yang sama namun dalam penyajian data dan hasil penelitian bisa berbeda. Penelitian ini hanya berfokus pada pertama, peran pemerintah kalurahan dalam pengembangan Kalurahan rintisan budaya di kalurahan wijirejo kapanewon pandak kabupaten bantul; kedua, tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Kalurahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, dalam Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan terdiri dari Kepala Kalurahan, yang mungkin disebut dengan istilah lain, dan dibantu oleh Perangkat Kalurahan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kepala Kalurahan memiliki sejumlah wewenang, yaitu: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; 2)

Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kalurahan; 3) Mengelola keuangan dan aset Kalurahan; 4) Menetapkan Peraturan Kalurahan; 5) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; 6) Mendorong kehidupan masyarakat Kalurahan; 7) Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan; 8) Meningkatkan perekonomian Kalurahan dan mengintegrasikannya untuk mencapai kemakmuran masyarakat; 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat; 10) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; 11) Memanfaatkan teknologi yang tepat guna; 12) Mengkoordinasikan pembakngunan Kalurahan secara partisipatif; 13) Mewakili Kalurahan di pengadilan atau memberikan kuasa hukum sesuai peraturan perUndang-Undangan; dan 14) Melaksanakan wewenang lain yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah Kalurahan berfungsi sebagai aktor dan institusi yang memiliki wewenang serta hak untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tindakan mengatur dan mengelola memiliki beberapa makna, yaitu:

Pertama, mengeluarkan dan melaksanakan peraturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat semua pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan pembakngunan atau pelayanan, serta menangani masalah yang muncul.

Ketiga, memutuskan dan melaksanakan alokasi sumber daya (seperti dana, peralatan, dan personel) dalam kegiatan pembakngunan atau pelayanan, termasuk membakgikan sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti melaksanakan, menjalankan, dan merawat pelayanan publik yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah Kalurahan memiliki tiga fungsi utama: pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan mencakup pembuatan peraturan mengenai pemanfaatan barang-barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Sementara itu, pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat (Eko Sutoro, 2014).

Perubahan nama dari Kalurahan menjadi kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 merupakan bagian dari penyesuaian administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan khusus yang dimiliki oleh DIY, termasuk di dalamnya pembentukan struktur pemerintahan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 adalah pemberian otonomi yang lebih besar kepada pemerintah DIY untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan, termasuk perubahan status dan nama pemerintahan Kalurahan menjadi kelurahan. Dalam konteks ini, perubahan nama dari Kalurahan menjadi kelurahan di DIY tidak hanya mencerminkan aspek administratif, tetapi juga merupakan langkah untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan di daerah yang lebih kecil, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara historis, Kalurahan di DIY telah menjadi bagian yang sangat penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat, dengan kebudayaan lokal yang kental dan beragam. Namun, dengan perkembangan zaman, peran Kalurahan sebagai unit pemerintahan dianggap perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan administratif yang lebih efisien. Undang-Undang Keistimewaan DIY memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan tersebut, yang dianggap lebih sesuai dengan perkembangan dinamika sosial dan budaya masyarakat, serta kebutuhan administratif yang lebih kompleks.

Perubahan nama Kalurahan menjadi kelurahan ini tidak semata-mata perubahan nomenklatur, tetapi juga disertai dengan perubahan dalam struktur pemerintahan dan pengelolaan sumber daya. Kelurahan yang sebelumnya lebih identik dengan wilayah perkotaan kini

diberlakukan di beberapa wilayah peKalurahan di DIY. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif, fleksibel, dan efisien, serta lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik.

Dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, disebutkan bahwa kelurahan yang terbentuk melalui perubahan dari Kalurahan ini tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat. Pemerintah kelurahan di DIY tetap memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat yang ada, meskipun dari segi administratif, status kelurahan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam hal pelayanan dan pengelolaan pemerintahan.

Proses perubahan nama ini juga sejalan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kelurahan diharapkan dapat lebih mudah dalam mengelola anggaran, merencanakan pembakngunan, dan melaksanakan program-program yang lebih terfokus, serta lebih memperhatikan aspek partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Selain itu, perubahan ini juga berpotensi untuk memperkuat pelaksanaan pembakngunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal.

Perubahan nama Kalurahan menjadi kelurahan berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 mencerminkan upaya pemerintah DIY untuk mewujudkan

pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tetap mengedepankan kearifan lokal dan budaya masyarakat, peralihan ini menjadi simbol adaptasi terhadap perubahan zaman, yang akan membakwa dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat DIY melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dan lebih terorganisi

Pemerintah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pemerintahan di DIY, termasuk pengaturan kewenangan khusus yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kalurahan. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah DIY untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal, termasuk pemerintahan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan dalam konteks Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga dan melestarikan budaya, serta membakngun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Kalurahanin pemerintahan Kalurahan yang diatur oleh undang-undang ini memungkinkan Kalurahan untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, budaya,

maupun manusia, yang semuanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY, Kalurahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah provinsi. Pemerintah Kalurahan diberi kewenangan lebih untuk merencanakan dan melaksanakan pembakngunan di Kalurahan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Salah satu tujuan utama pemberian otonomi kepada pemerintah Kalurahan adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembakngunan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan, tanpa terhambakt oleh birokrasi yang panjang di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam kerangka Undang-Undang Keistimewaan DIY, Kalurahan juga berperan dalam penguatan kebudayaan lokal. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kalurahan adalah mengelola dan melestarikan kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat DIY. Kalurahan memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kearifan lokal, adat istiadat, serta tradisi yang sudah ada sejak lama, yang merupakan bagian dari nilai-nilai budaya yang harus dijaga agar tetap relevan dengan perkembakngan zaman. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kalurahan juga diharapkan dapat mengembangkan potensi budaya sebagai sumber daya yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pariwisata budaya maupun ekonomi kreatif berbasis budaya

Selain itu, pemerintah Kalurahan di DIY juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan administratif di tingkat Kalurahan dengan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan Kalurahan untuk lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat, seperti dalam hal pelayanan publik, pembakngunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan. Pemerintah Kalurahan diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Undang-Undang Keistimewaan DIY juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemerintahan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembakngunan. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembakngunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat menjadi lebih harmonis dan saling mendukung, yang pada gilirannya akan memperkuat pemerintahan Kalurahan itu sendiri.

Pemerintah Kalurahan juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Dalam konteks ini, Kalurahan bukan hanya berperan dalam pengelolaan administrasi, tetapi juga sebagai pelindung dan pembakng budaya lokal. Kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kalurahan diharapkan dapat dilestarikan dan diberdayakan untuk kepentingan pembakngunan Kalurahan itu sendiri. Sebagai contoh, pengembangan Kalurahan wisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu program unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan melalui pengelolaan produk budaya lokal.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pemerintah Kalurahan di DIY untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang lebih mandiri, efektif, dan efisien. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah Kalurahan dapat lebih mudah dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kebudayaan lokal, dan menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah Kalurahan di DIY menjadi ujung tombakk dalam menjaga keberlanjutan dan perkembakngan daerah, serta memperkuat struktur pemerintahan yang ada di tingkat lokal.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan menyebutkan bahwa Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan menyebutkan bahwa Kalurahan memiliki kewenangan meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kalurahan;
- b. Kewenangan lokal berskala Kalurahan;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten.
- d. Kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan.

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Kalurahan, membina perekonomian Kalurahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan, mendamaikan perselisihan masyarakat di Kalurahan, mengajukan rancangan peraturan Kalurahan dan menetapkan sebagai peraturan Kalurahan bersama dengan BPD, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kalurahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja

dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kalurahan, mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kalurahan dengan baik, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan wilayah peKalurahanan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kalurahan terdiri dari Kepala Kalurahan dan perangkatnya, yang berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalurahan melalui usaha yang dipadukan dengan program pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kalurahan (pemerintahan setingkat lebih rendah dari Kalurahan) memiliki kewenangan yang mencakup hak asal-usul, kewenangan lokal, serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsep desentralisasi dan otonomi daerah juga menekankan bahwa Pemerintah Kalurahan memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembakngunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

2. Kalurahan Budaya

Kalurahan budaya adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional, adat istiadat, seni, serta

kepercayaan yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Kalurahan. Kalurahan budaya bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sebuah ruang hidup yang penuh dengan kearifan lokal dan warisan leluhur yang dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Di dalamnya, masyarakat berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dengan pelestarian budaya yang mereka anut (Rachma et al., 2023).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta melalui keputusan Gubernur DIY nomor 262/3+KPTS/2016 Penetaan Desa/kalurahan Budaya 2 Desember 2016 Pada saat keputusan ini berlaku keputusan gubernur DIY nomor 325/KPTS/1995 tidak berlaku telah ditetapkan sebanyak 568 Kalurahan sebagai Kalurahan budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah ini merupakan kebijakan lokal pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya melaksanakan pembakngunan regional menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang 2 maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan ketahanan sosial budaya dan sumberdaya berkelanjutan

Keberadaan Kalurahan budaya dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kepercayaan, kesenian, matapencaharian,

sosial, serta lingkungan hidup. Aspek kepercayaan mencerminkan betapa pentingnya spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Kalurahan. Ritual-ritual agama dan adat tradisi yang dilaksanakan secara rutin menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian mereka, memperkuat identitas dan rasa kebersamaan antar warganya (Muhammad Rizalul Haq et al., 2024)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kalurahan atau Kalurahan, budaya merujuk pada aktivitas manusia yang mencakup adat, tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Peraturan yang telah disahkan oleh undang-undang ini mewajibkan setiap Kalurahan/Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan mengembangkan budaya yang ada agar tercatat serta mendapatkan SK. Salah satu pencapaian tersebut adalah status Kalurahan Budaya, yang menjadi tujuan dari Kalurahan/Kalurahan rintisan budaya (Widyadsawitri, 2021)

Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah yang harus diambil agar Kalurahan/Kalurahan Rintisan Budaya bisa menjadi Kalurahan Budaya, antara lain: 1) Mengidentifikasi potensi yang ada di Kalurahan, termasuk adat istiadat, kesenian, kebudayaan, alam, dan sejarah. 2) Pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari anggota dengan keahlian di bidang kebudayaan, pariwisata, seni, dan lain-lain. 3) Penyusunan

rencana pengembangan Kalurahan Budaya, yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan program untuk mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya menjadi Kalurahan Budaya. 4) Pelaksanaan program yang melibatkan pengembangan kesenian, adat istiadat, pariwisata, pelatihan, dan pembinaan. 5) Evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program serta memperbaiki kekurangan. 6) Sertifikasi sebagai Kalurahan Budaya jika seluruh program yang direncanakan telah terlaksana, yang menandakan bahwa Kalurahan tersebut berhasil dalam mengembangkan potensi kebudayaannya (Firdaus et al., 2023).

Tahap-tahap yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa untuk mengubah Kalurahan Rintisan Budaya menjadi Kalurahan Budaya, diperlukan identifikasi menyeluruh terhadap potensi kebudayaan yang ada, agar dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keahlian individu maupun masyarakat secara umum. Proses ini harus dirancang dan diprogramkan oleh Pemerintah Kalurahan hingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Identifikasi dan pengelolaan potensi budaya adalah kegiatan yang sangat penting untuk ditingkatkan, karena berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 346/KEP/2021 mengenai bantuan pengembangan usaha bersama serta kegiatan pengelolaan data fakir miskin, juga bantuan keuangan khusus pada anggaran 2021, keputusan ini mengatur bentuk kontribusi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan/Kalurahan.

Kontribusi ini termasuk pelatihan untuk kelompok pengelola kebudayaan, meskipun kontribusi tersebut sering kali berupa pelatihan bagi kelompok penggiat seni atau kelompok pengelola budaya lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki usaha dan komunitas di Kalurahan. Selain itu, syarat untuk terdaftar sebagai Kalurahan Budaya diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 325/KPSTS/1995 tentang pedoman pembentukan Kalurahan Bina Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berfokus pada aktualisasi, pengembangan, dan konservasi potensi budaya yang ada, meliputi:

1. Adat dan tradisi
2. Kesenian, dan Permainan tradisional
3. Bahasa, sastra dan aksara
4. Kerajinan, kuliner, Pengobatan tradisional
5. Penataan ruang dan Warisan budaya

Dari berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh mandat atau SK sebagai Kalurahan/Kalurahan Budaya, berbagai syarat yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur harus dipenuhi. Hal ini merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kalurahan/Kalurahan untuk mengelola dan membina potensi yang telah diatur secara sistematis oleh provinsi. Untuk menjadi Kalurahan Budaya, perlu pengelolaan potensi secara baik serta pelestarian kebudayaan agar tetap hidup dan berkelanjutan, sehingga menjadi ciri

khas yang menarik bagi wisatawan dan memberikan nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat dan pemerintah Kalurahan (pergub, 2014).

Tujuan dari Kalurahan Budaya adalah melestarikan dan mengembangkan potensi Adat tradisi, Kesenian, Kerajinan, arsitektur dan tata ruang agar menumbuhkan jati diri, pembentuk citra Kalurahan sebagai salah satu penyusun untuk mencapai visi DIY sebagai Pusat Budaya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dinas Kebudayaan-an Propinsi DIY, 2016).

Pelestarian budaya lokal melalui Kalurahan budaya penting untuk dikembangkan dengan pendekatan manajemen destinasi. Hal ini dikarenakan Kalurahan budaya yang memuat sumberdaya-sumberdaya budaya memiliki peluang menjadi destinasi wisata. Beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan berdasarkan manajemen destinasi pariwisata (Damanik, Janianton dan Frans Teguh, 2013:30), sebagai berikut.

- 1) Kepemimpinan dan koordinasi. Penguatan lembaga Kalurahan budaya dalam menjalankan fungsi pengelolaan Kalurahan budaya
- 2) Kerjasama dan kemitraan. Penguatan forum komunikasi dan koordinasi antara masing-masing Kalurahan budaya dan pemerintah daerah terkait guna menciptakan sinergi berkelanjutan
- 3) Penelitian dan perencanaan. Penguatan pengembangan Kalurahan budaya sebagai suatu bentuk program, melakukan

inventarisasi aset budaya secara berkala dan sosialisasi berbagai hasil kajian dan program pengembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah propinsi terkait dengan pengelolaan Kalurahan budaya

- 4) Pendampingan masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini melalui berbagai kegiatan fasilitasi untuk menggerakkan semua aset yang dimiliki di lingkungan Kalurahan budaya termasuk dukungan dan partisipasi masyarakat
- 5) Pengembangan produk. Penguatan potensi budaya baik tangible dan intangible yang memiliki nilai jual sebagai komoditi budaya.
- 6) Pemasaran dan promosi. Penguatan pemasaran dan promosi melalui kegiatan-kegiatan budaya di lingkungan Kalurahan budaya perlu dilakukan ajang kompetisi (lombak, festival budaya) secara rutin antar Kalurahan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, pengelolaan Kalurahan budaya memerlukan strategi-strategi yang komprehensif untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Kalurahan budaya meliputi aspek kepercayaan, kesenian, mata pencaharian, teknologi, sosial, komunikasi, serta lingkungan, tata ruang, dan arsitektur.

a. Aspek Kepercayaan

Dalam aspek ini, strategi yang perlu diterapkan melibatkan peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan,

dan prasarana. Sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan kebanggaan dan kecintaan terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan upacara tradisional. Generasi muda perlu diberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam tentang nilai-nilai tradisional. Kelembakgaan harus mendukung pertumbuhan organisasi-organisasi keagamaan dan kepercayaan, serta mengembangkan komunikasi dan kerjasama antar lembaga tersebut. Prasarana harus dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dengan memanfaatkan sumber dana masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat, serta peningkatan penggunaan teknologi multimedia untuk pengajaran agama dan adat.

b. Aspek Kesenian

Pada aspek kesenian, penting untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai potensi seni yang dimiliki Kalurahan, serta pentingnya pelestarian seni tradisional. Sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan semangat dan kecintaan terhadap kesenian tradisional di kalangan generasi muda. Kelembakgaan diharapkan dapat mengembangkan kelompok pelestari seni dan meningkatkan kreativitas kelompok-kelompok kesenian serta sanggar-sanggar seni. Kerjasama antar pihak juga perlu diperkuat untuk

mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional. Prasarana dapat memberikan stimulan finansial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenian, serta meningkatkan jaringan kemitraan seni.

c. Aspek Matapencarian

Dalam aspek matapencarian, strategi yang diperlukan mencakup pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, dan prasarana. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan menguasai teknik pertanian dan kerajinan, serta mendorong inisiatif masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan kerajinan. Kelembagaan diharapkan dapat memberdayakan kelompok masyarakat untuk meningkatkan wawasan bertani dan berkerajinan, serta mengembangkan kerjasama dalam pengembangan produksi pertanian dan kerajinan. Prasarana perlu memberikan stimulan finansial untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kreativitas kerajinan, serta mempermudah akses pemasaran hasil produk.

d. Aspek Teknologi

Aspek teknologi juga penting dalam pengelolaan Kalurahan budaya. Sumber daya manusia perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan teknologi pertanian dan kerajinan secara bijak. Selain itu, pengendalian pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian sangat penting untuk menjaga

kelestarian budaya dan lingkungan. Kelembakgaan perlu mewujudkan kemitraan dalam penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prasarana dapat berupa pemberian insentif untuk upaya pemanfaatan dan pelestarian teknologi tradisional.

e. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, strategi pengelolaan Kalurahan budaya difokuskan pada peningkatan semangat kebersamaan dan kepedulian antar warga Kalurahan. Sumber daya manusia harus mengembangkan semangat saling tolong-menolong, saling menghargai, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan pranata norma-norma yang terkait dengan adat masyarakat. Kelembakgaan harus mengoptimalkan kinerja lembakga sosial masyarakat setempat, serta meningkatkan kerjasama antar lembakga sosial. Prasarana perlu ditingkatkan dalam hal kuantitas dan kualitas sarana sosial, serta pengembangan informasi terkait program pengembangan masyarakat.

f. Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi dalam pengelolaan Kalurahan budaya sangat berperan penting dalam pelestarian bahasa daerah. Sumber daya manusia perlu menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap bahasa daerah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian bahasa

daerah. Kelembakgaan harus meningkatkan kerjasama dalam pengembangan bahasa daerah dengan lembakga terkait, sedangkan prasarana dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana untuk mendukung pelestarian bahasa daerah melalui berbagai program budaya.

g. Aspek Lingkungan, Tataruang, dan Arsitektur

Pengelolaan lingkungan, tataruang, dan arsitektur juga merupakan bagian penting dalam strategi pengelolaan Kalurahan budaya. Sumber daya manusia harus dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta menata tata ruang dan arsitektur Kalurahan dengan bijaksana. Kelembakgaan perlu menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup, tata ruang, dan arsitektur. Prasarana juga perlu memberikan stimulan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan kawasan peKalurahan.

Dengan berbagai strategi ini, diharapkan pengelolaan Kalurahan budaya dapat berjalan dengan baik dan mampu melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kalurahan.

3. Kalurahan Rintisan Budaya

Rintisan Kalurahan Budaya merupakan sebuah konsep Kalurahan yang menekankan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal sambil memanfaatkan inovasi dan teknologi. Kalurahan ini mencoba menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis budaya, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Caturharjobantul.Kalurahan.id, 2023).

Kalurahan Rintisan Budaya di Yogyakarta merupakan upaya penting untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Yogyakarta, yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa, kaya akan tradisi, seni, dan adat istiadat yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakatnya. Pengembangan Kalurahan rintisan budaya ini diluncurkan sebagai respons terhadap perubahan sosial dan dampak globalisasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat, di mana kemajuan teknologi dan modernisasi membakwa tantangan bagi pelestarian nilai-nilai budaya tradisional. Melalui Kalurahan rintisan budaya, masyarakat diberi ruang untuk menghidupi, mengembangkan, dan mempraktikkan budaya mereka sambil menjaga kekayaan budaya yang ada. Kalurahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda agar mereka tetap mencintai warisan budaya tersebut, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya yang memberdayakan masyarakat Kalurahan.

Rintisan Kalurahan Budaya merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memulai atau mengembangkan usaha-usaha dalam melestarikan kebudayaan dan cagar budaya di suatu wilayah, khususnya di tingkat kalurahan (Kalurahan/kelurahan). Kalurahan Budaya tidak hanya berfokus pada pengembangan budaya lokal, tetapi juga mengintegrasikan upaya pelestarian cagar budaya yang ada, baik yang bersifat fisik (seperti bangunan bersejarah) maupun non-fisik (seperti tradisi, ritual, atau kesenian lokal) (Hata, 2023).

Menyambung pembahasan di atas, Karmadi (2007) menyebutkan motivasi-motivasi yang diperlukan dalam rintisan budaya antartara lain:

1. Motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya;
2. Motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati;
3. Motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya;
4. Motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya local akan meningkat bila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya; dan

5. Motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat.

Selain pelestarian budaya, Kalurahan rintisan budaya juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan adanya kegiatan budaya yang rutin, Kalurahan ini dapat menarik wisatawan yang ingin menikmati keindahan seni tradisional, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan usaha kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan kesenian yang menjadi daya tarik wisata. Keberadaan Kalurahan rintisan budaya ini mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan dan kearifan lokal yang menjadi pondasi utama dalam Kalurahan ini sangat kuat, dan masyarakat Kalurahan sangat memegang teguh tradisi keagamaan dan adat yang mereka miliki. Upacara adat seperti selamatan atau ruwatan, serta tradisi nyadran, menjadi bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai budaya tersebut, yang juga melibatkan generasi muda agar mereka tetap memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari.

Pelestarian kesenian tradisional, seperti wayang kulit, gamelan, tari tradisional, dan kerajinan tangan, juga menjadi fokus utama dalam Kalurahan rintisan budaya ini. Festival seni yang melibatkan masyarakat Kalurahan menjadi ajang untuk menampilkan karya seni,

baik seni pertunjukan maupun kerajinan tangan, yang dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Kalurahan ini juga menyediakan sanggar seni untuk mengasah bakat dan keterampilan seni masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga seni tradisional tetap terjaga dan berkembang.

Selain itu, Kalurahan rintisan budaya juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata berbasis budaya. Produk-produk budaya lokal yang dijual kepada wisatawan, seperti kerajinan tangan, batik, tenun, dan kuliner tradisional, menjadi daya tarik yang tidak hanya memperkenalkan budaya Yogyakarta, tetapi juga memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usaha kecil dan menengah berbasis budaya berkembang pesat, menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Adapun rintisan budaya di Kalurahan/Kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2014 mengenai pengelolaan budaya di tingkat Kalurahan dan Kalurahan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan budaya lokal. Selain itu, peraturan tentang kebudayaan ini diperbarui dan diperkuat untuk meningkatkan kebudayaan daerah melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kalurahan Mandiri Budaya. Dalam peraturan ini, terdapat upaya untuk memberikan panduan bagi Kalurahan/Kalurahan yang memiliki potensi dalam mengelola, merintis, dan mengembangkan budaya lokal yang dimiliki. Ini menjadi

acuan utama di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemajuan dan perkembangan kebudayaan serta untuk menjaga agar daerah ini tetap terpelihara dengan baik. Sejumlah pandangan dari para ahli juga mendukung hal ini, bahwasanya rintisan kalurahan budaya sebagai sistem dinamis yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman memberikan landasan yang sangat penting bagi upaya pelestarian budaya di Kalurahan atau kalurahan. Rintisan Kalurahan/kalurahan budaya tidak hanya menjadi wadah untuk mempertahankan tradisi, tetapi juga sebagai sarana untuk merespon perubahan dan tantangan yang ada. Dengan memberi ruang untuk inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, Kalurahan atau kalurahan dapat menciptakan budaya yang tidak hanya lestari, tetapi juga relevan dan berkembang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ini akan memastikan bahwa kebudayaan lokal tidak hanya dipertahankan sebagai warisan, tetapi juga sebagai entitas yang terus hidup dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (Koentjaraningrat 1990).

Penetapan Kalurahan /kalurahan rintisan budaya memiliki tahap Verifikasi yang dilakukan meliputi adat, tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, serta bangunan dan warisan budaya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Nugroho Eko Setyanto dalam sambutannya (Bantulkab.go.id, 2023).

Meskipun Kalurahan rintisan budaya di Yogyakarta telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga agar budaya lokal tetap relevan dengan perkembangan zaman, mengingat globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus berlanjut. Selain itu, masalah pendanaan juga menjadi hambatan dalam pengelolaan Kalurahan ini, sehingga sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk kelancaran pengelolaan Kalurahan rintisan budaya

Namun, meskipun menghadapi tantangan tersebut, prospek Kalurahan rintisan budaya di Yogyakarta sangat cerah. Dengan semakin meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman budaya yang autentik, Kalurahan-Kalurahan ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata budaya yang berkembang pesat. Selain itu, kesadaran generasi muda yang semakin tinggi akan pentingnya melestarikan budaya juga akan mendukung Kalurahan ini untuk terus hidup dan berkembang. Oleh karena itu, Kalurahan rintisan budaya di Yogyakarta menjadi contoh nyata bagaimana budaya dapat dipertahankan dan berkembang, meskipun dalam menghadapi perubahan zaman yang terus menerus.

Dengan demikian, Kalurahan rintisan budaya di Yogyakarta merupakan sebuah inisiatif yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal. Melalui pelestarian kepercayaan, kesenian tradisional, serta pemberdayaan ekonomi berbasis budaya, Kalurahan-Kalurahan ini menjadi ruang hidup yang

terus berkembang, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia yang akan terus dikenang dan diwariskan kepada generasi mendatang

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki objek penelitian yang bersifat alami. Berbeda dengan eksperimen, dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi (gabungan). Analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Metode penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi yang bertujuan untuk memahami perilaku individu atau kelompok serta Menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses ini dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data melalui pengaturan partisipan, melakukan analisis data secara induktif, serta menyusun

data yang terfragmentasi menjadi tema-tema yang relevan, kemudian memberikan interpretasi makna terhadap data yang diperoleh (Creswell dalam Sugiyono, 2017).

2. Unit Analisis Data

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu bagaimana Pemerintah Kalurahan Wijirejo mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sering juga disebut dengan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive adalah penentuan informasi didasarkan pada tujuan tertentu yang mengetahui bagaimana dinamika Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan

permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi kondisi latar penelitian (sugiyono, 2018)

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah orang-orang yang merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi kondisi latar penelitian. Inform dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari:

Nama-nama Informan Penelitian

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Wisnu Riyanto	Lurah
2	Bintara, S.Pd	Ulu-Ulu
3	Heri Sujoko, SE	Danarta
4	Rini Aliah	Tokoh Masyarakat
5	Drs. Edi Rianto	Ketua Dewan Budaya
6	Muji Lestari	Ketua Bamuskal

Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2025

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2017), observasi adalah proses di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu secara langsung di lokasi

penelitian. Dalam observasi ini, digunakan metode pengamatan langsung terhadap suatu objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Pengumpulan data dilakukan melalui indra peneliti dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi sering dilakukan ketika informasi tentang masalah yang sedang diteliti masih terbatas. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah tersebut, serta kemungkinan petunjuk untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah yang diteliti. Peneliti melakukan observasi di kalurahan wijirejo dengan mengamati dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan Desa Rintisan Budaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau maupun lebih, dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini peneliti mengkombinasikan dua jenis wawancara yaitu wawancara mendalam (in depth interview) dan wawancara terarah (Sugiyono, 2017). Wawancara mendalam dilakukan dilakukan dengan cara bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam

Sedangkan wawancara terarah peneliti menanyakan kepada informan terkait hal-hal yang sudah disiapkan sebelumnya untuk wawancara.

Dengan demikian, peneliti peneliti dapat memperoleh data/informasi di lokasi penelitian secara langsung berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui tanya jawab, sehingga peneliti dapat melakukan wawancara yang mendalam dengan pihak terkait (informan penelitian) dengan mengacu pada pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti untuk menjadi pijakan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti otentik bagi peneliti dengan menggunakan alat yang dipersiapkan/seadanya untuk mengambil data yang diperlukan secukupnya. Dokumen lain juga adalah dokumen yang berbentuk tulisan misalnya gambarkan umum Kalurahan Sambirejo, sejarahnya yang terdapat dalam profil Kalurahan, kebijakan-kebijakan, serta dokumen yang berbentuk gambakr misalnya foto. Hasil dokumen yang ada kemudian diolah sedemikian rupa, agar dapat melengkapi data yang sudah diperoleh dari metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini dokumentasi merujuk pada fakta-fakta yang tersimpan dalam profil Kalurahan Wijirejo dan

fakta yang terdapat pada Profil Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo dan juga foto bersama informan penelitian pada saat wawancara.

4. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif menurut Moleong (2007). Data yang diperoleh dalam bentuk ucapan dan tulisan akan diolah dengan cara mengungkapkannya dalam kata-kata atau kalimat, serta mengklasifikasikan seluruh data dan menghubungkan aspek-aspek yang relevan. Selanjutnya, dalam proses analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing atau verification).

a. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses untuk memilah data yang penting dan yang tidak penting, serta mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola hubungan antar kategori, dan menarik

kesimpulan, sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun pihak lain.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan, kemudian dianalisis, dideskripsikan, dan direfleksikan (Sugiyono, 2016). Peneliti melakukan reduksi data yaitu data yang tidak relevan dikesampingkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian untuk merumuskan, melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil dari proses reduksi yang disusun dalam laporan secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagiannya, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh (Sugiyono, 2018). Selanjutnya dalam hal penyajian data, peneliti akan melakukan penyusunan untuk memberikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai jenis data dan sumber yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dalam menyajikan data, peneliti memastikan

bahwa data disajikan dengan jelas,akurat,konsisten,dan mudah diinterpretasikan. Dengan demikian,pembakca dapat memahami informasih yang di sampaikan dengan baik dan membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan data yang disajikan.

BAB II

RINTISAN BUDAYA DI KALURAHAN WIJIREJO

A. Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana yang diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam Desa/Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang- Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembakngunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembakntu Lurah Kalurahan yang meliputi Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Kalurahan bertugas membakntu Lurah Kalurahan dalam bidang administratif Pemerintah Kalurahan yang dipimpin oleh Carik Kalurahan dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari

tiga Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan dan tugas pelaksana kewilayahan terdiri dari 10 pedukuhan di Kalurahan Wijirejo.

Pemerintahan Kalurahan Wijirejo

Tabel 2. 1 Pemerintahan Kalurahan Wijirejo

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin
1.	Wisnu Riyanto	Kepala Kalurahan (Lurah)	S1	L
2.	H. Fauzi Afnan, SP	Sekretaris Kalurahan (Carik)	S1	L
3.	Heri Sugiyanta	Kaur Tata Usaha & Umum (Tataklasana)	SMU/SMK	L
4.	Heri Sujoko, SE	Kaur Keuangan (Danarta)	S1	L
5.	Febriana Ika Kusuma	Kaur Perencanaan (Pangripta)	S2	P
6.	Narya Tri Widada	Ka.Sie Pemerintahan (Jagabaya)	SMU/SMK	L
7.	Bintara, S.Pd	Ka.Sie Kesejahteraan (Ulu-Ulu)	S1	L
8.	Drs. Hariyadi	Ka.Sie Pelayanan (Kamituwo)	S1	L
9.	H. Duror	Dukuh Kauman	SMU/SMK	L
10.	Amin Margiatna	Dukuh Bajang	D3	L
11.	Tatang Subagya	Dukuh Gesikan IV	SMU/SMK	L
12.	Sutardi	Dukuh Kwalangan	SMU/SMK	L
13.	Kabirun	Dukuh Gesikan III	SMU/SMK	L
14.	H. Maryadi	Dukuh Ngeblak	SMU/SMK	L
15.	Tumijo, A.Md	Dukuh Pedak	D3	L
16.	Nanan Widiya	Dukuh BERGAN	SMU/SMK	L
17.	Dalmini	Dukuh Pandak	SMU/SMK	P
18.	Ignatius Widodo	Dukuh Gedongsari	SMU/SMK	L

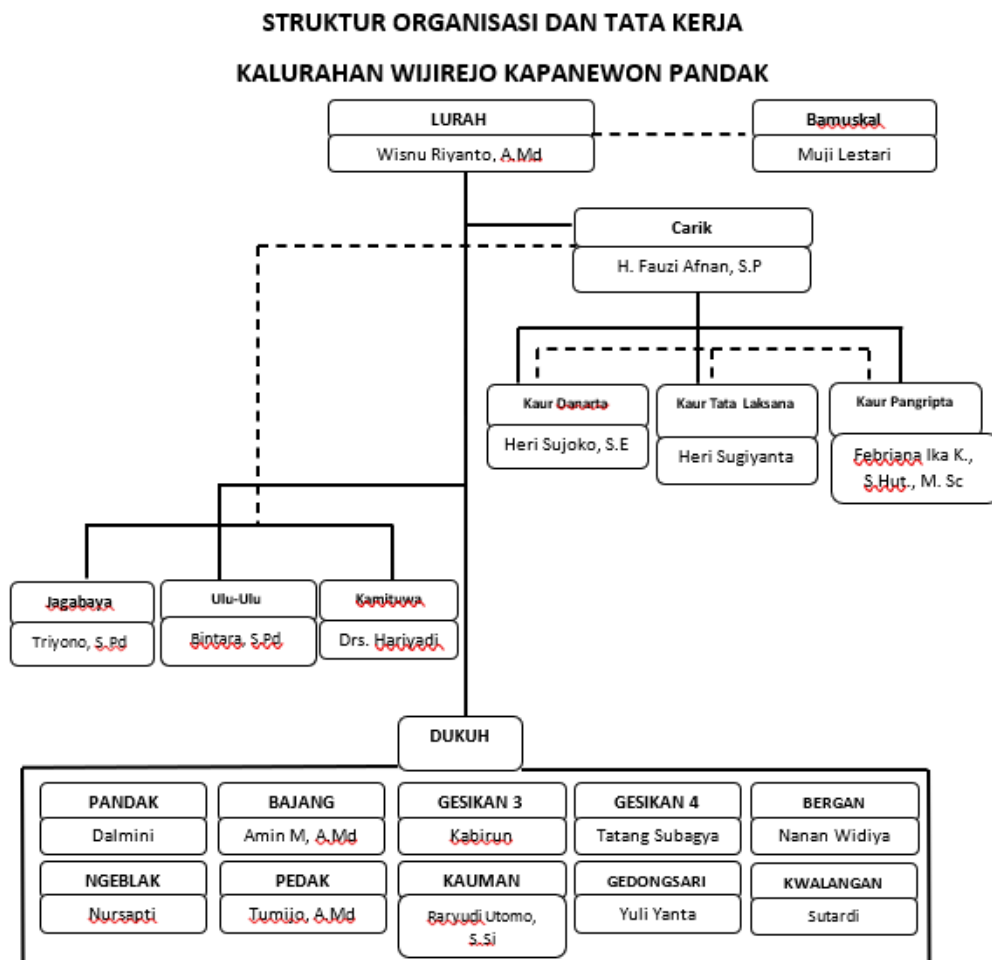
Sumber : Data Monografi Kalurahan Wijirejo 2022

Dari hasil tabel diatas disimpulkan bahwa Profil Pemerintah Kalurahan Wijirejo ini didominasi oleh laki-laki, dengan hanya satu perangkat Kalurahan perempuan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan. Dari segi pendidikan, sebagian besar perangkat Kalurahan memiliki latar belakang

pendidikan menengah atas (SMU), namun posisi-posisi kunci seperti Kepala Kalurahan, Sekretaris Kalurahan, dan Kaur Perencanaan diisi oleh individu dengan gelar sarjana (S1). Sebagian besar kepala dusun juga memiliki pendidikan menengah atas, dan hanya beberapa yang berpendidikan D3.

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wijirejo

Gambakr 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wijirejo



Sumber: Profil Kalurahan Wijirejo, 2024

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kalurahan Wijirejo memiliki struktur organisasi pemerintahan yang terinci, dipimpin oleh

seorang kepala Kalurahan, didukung oleh sekretaris Kalurahan, serta di bagi kedalam berbagai seksi (Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan) dan urusan (TU dan Umum, keuangan, Perencanaan) dengan penanggung jawaban yang jelas untuk setiap posisinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan dan Pergub Nomor 25 Tahun 2019, Pemerintah Kalurahan Wijirejo sudah menyusun struktur penyelesaian dengan cukup jelas sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

B. Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo dibentuk berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Kalurahan Budaya. Kalurahan Wijirejo resmi ditetapkan sebagai Kalurahan Rintisan Budaya pada 14 November 2023 melalui SK Bupati Bantul. Penetapan ini merupakan hasil dari upaya bersama masyarakat, pemerintah Kalurahan, dan dukungan lembaga terkait yang aktif mengembangkan seni dan budaya lokal. Wijirejo memiliki 57 kelompok seni budaya, dengan ketoprak sebagai yang terbanyak, serta berbagai usaha tradisional seperti batik, kuliner khas, dan kerajinan anyaman. Status sebagai Kalurahan Rintisan Budaya diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

1. Visi Misi Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

Visi dan misi merupakan arah dan tujuan yang jelas bagi sebuah organisasi visi dan misi adalah dua elemen penting dalam perencanaan dan pengembangan organisasi. Visi memberikan gambarkan besar tentang masa depan yang diinginkan, sementara misi menentukan tujuan-tujuan spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

a. Visi

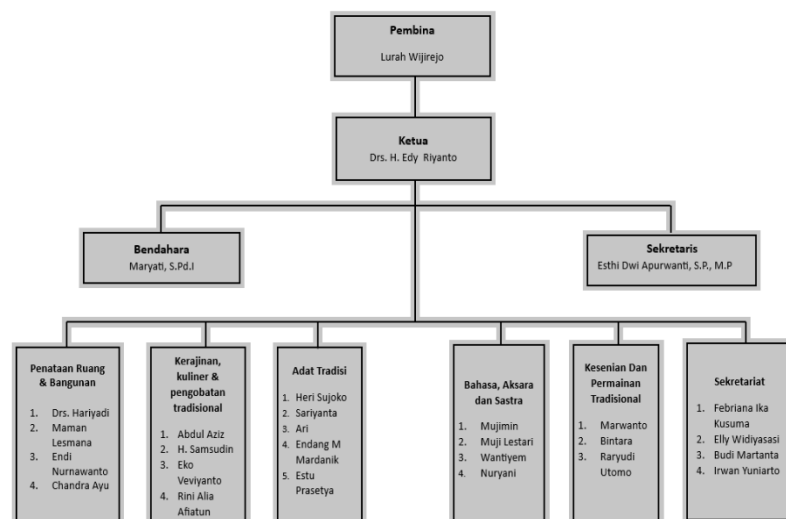
“Mewujudkan kalurahan yang Berbudaya dan bermartabat”.

b. Misi nya adalah sebagai berikut

- 1) Mengembangkan tradisi yang sudah ada
- 2) Menjaga tradisi yang sudah ada dan
- 3) Melestarikan tradisi yang sudah ada

2. Struktur Organisasi Rintisan Budaya

Gambakr 2. 2 Struktur Organisasi Rintisan Budaya



Sumber: Pengelola Rintisan budaya Kalurahan Wijirejo, 2024

Bidang Pengurus Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

Tabel 2. 2 Bidang Pengurus Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

No	Nama	Bidang
1.	Drs. H. Edy Riyanto	Ketua
2.	Esthi Dwi Apurwanti, S.P., M.P	Sekretaris
3.	Maryati, S.Pd.I	Bendahara
4.	Heri Sujoko, SE	Koordinator Seksi Tradisi
5.	Sariyanta	Seksi Tradisi Adat
6.	Ari	Seksi Tradisi Adat
7.	Endang M Mardanik	Seksi Tradisi Adat
8.	Estu Prasetya, S.Kom	Seksi Tradisi Adat
9.	Marwanto, S.Pd	Koordinator Kesenian dan Permainan Tradisional
10.	Bintara, S.Pd	Seksi Kesenian
11.	Raryudi Utomo, S.Si	Seksi Permainan Tradisional
12.	Mujimin, S.Pd	Koordinator Bahasa, Aksara dan Sastra
13.	Muji Lestari	Seksi Bahasa
14.	Wantiyem	Seksi Aksara
15.	Nuryani, S.Pd	Seksi Sastra
16.	Abdul Aziz	Koordinator Kerajinan, Kuliner & Pengobatan Tradisional
17.	H. Samsudin	Seksi Kerajinan
18.	Eko Veviyanto	Seksi Kuliner
19.	Rini Alia Afiatun	Seksi Pengobatan Tradisional
20.	Drs. Hariyadi	Koordinator Penataan Ruang & Bangunan Serta Warisan Budaya
21.	Maman Lesmana, ST., MT	Seksi Penataan Ruang
22.	Endi Nurnawanto, S.Pd.M.Or	Seksi Bangunan
23.	Chandra Ayu, S.Pd	Seksi Warisan Budaya
24.	Febriana Ika Kusuma, S.Hut., M.Sc	Koordinator Sekretariat
25.	Elly Widiyasasi, S.P	Seksi Sekretariat
26.	Budi Martanta	Seksi Sekretariat
27.	Irwan Yunianto	Seksi Sekretariat

Sumber: Pengelola Rintisan budaya Kalurahan Wijirejo, 2024

Pembentukan pengurus dan pengelola Kalurahan Rintisan Budaya telah di atur dalam keputusan Lurah Wijirejo Nomor 48 Tahun 2023 dan berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Susunan pengurus dan koordinator bidang budaya di Kalurahan Wijirejo menunjukkan

struktur organisasi yang terorganisir dan komprehensif, dengan pembakgian tugas yang jelas pada bidang tradisi, kesenian, bahasa dan sastra, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, serta penataan ruang dan warisan budaya. Keterlibatan tenaga profesional dan berlatar pendidikan tinggi memperkuat kualitas pengelolaan budaya.

Alokasi Anggaran Kebudayaan

Gambar 2. 3 Alokasi Anggaran Untuk Kebudayaan

URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	SATUAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN
					Rp.	Rp.	Rp.	
KEAGAMAAN								
Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Terciptanya Pelestarian Seni dan Budaya	1	Paket	Swakelola	20.615.000	10.070.000	10.545.000	48,85%
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan	Menumbuhkan Rasa Cinta Terhadap Pemerintah Kalurahan dan kabupaten	1	Paket	Swakelola	20.740.000	20.740.000	-	100%
Pembinaan Bidang Keagamaan	Terciptanya Kerukunan Beragama	1	Paket	Swakelola	18.105.000	18.105.000	-	100%
Pembinaan / Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Terwujudnya Kalurahan Budaya dan Budaya Tetap Lestari	1	Paket	Swakelola	17.850.000	15.850.000	2.000.000	88,80%

Sumber: *APBKal Kalurahan Wijirejo Tahun 2024*

3. Jenis-Jenis Kegiatan Budaya

a. Kegiatan Upacara Adat

Nyadran Agung Makam Sewu merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat kalurahan Wijirejo. Kegiatan ini sebagai wujud Memohon ampun atas dosa leluhur terutama Panembakhan Bodo dan pengikut yang menyebarkan syiar Islam di Bantul Barat.kegiatan rutinitas ini dilaksanakan oleh Panitia Nyadran

Makam sewu pengurus rintisan budaya, pemerintah kalurahan, warga masyarakat dan sering dilaksanakan pada setiap tanggal 20 atau lebih disetiap bulan ruwah

Wiwit Massal Bulak Kidul Kadek kegiatan rutin tahunan yang di laksanakan oleh warga masyarakat Kalurahan Wijirejo. Kegiatan ini merupakan permohonan kepada Tuhan agar hasil panen bagus, kegiatan rutinitas ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani dan P3A, pengurus Rintisan Budaya, pemerintah Kalurahan dan warga masyarakat dan kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali.

Merti Dusun merupakan kegiatan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Kalurahan Wijirejo. Kegiatan ini merupakan Rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan kepada warga kegiatan rutinitas ini dilaksanakan oleh Panitia Merti Dusun Gedongsari dan Bergan, pengurus Rintisan Budaya, Pemerintahan Kalurahan, dan warga masyarakat dan dilaksanakan satu tahun dua kali yaitu setiap bulan Mei dan Agustus.

Masih ada berbagai kegiatan adat kurang lebih 5 kegiatan, yaitu sebagai berikut: Besik Brintik, Upacara siraman pusaka, Upacara Labuhan, Nyadran Nyai Brintik dan Takjil bubur, kegiatan adat masih terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat, serta partisipasi masyarakat

yang begitu kental untuk kemajuan rintisan budaya di Kalurahan

Gambakr 2. 4 Kegiatan Upacara Adat



Sumber: Profil Kalurahan Wijirejo 2024

b. Kegiatan Upacara Tradisi Daur Hidup

Neloni merupakan salah satu upacara daur hidup dan dilaksanakan saat warga masyarakat yang berada dalam kondisi hamil ketika berusia 3 bulan, upacara ini dilakukan atas tujuan Meniupkan roh kehidupan sehingga bayi dalam kandungan memperoleh keselamatan dan tuntunan suci terbaik dari Tuhan.

Dari upacara ini dapat dilihat bahwa Kalurahan Wijirejo memiliki penjagaan yang sangat baik terhadap masyarakat dan upacara ini sudah menjadi hal yang wajib dilaksanakan, adapun beberapa kegiatan yang sama kurang lebih 8 di antaranya sebagai berikut : Ngapati, Nglimani, Mitoni (Tingkepan), Nyangani, Brokohan, Sepasaran kelahiran bayi,

Puputan, Selapanan (Cukur rambut bayi), Ruwatan, Upacara Tarub, Upacara nyantri, Upacara Siraman, Upacara Ngerik, Midodareni, Ijab, Panggih, Ngunduh Mantu, Brobosan, Surtanah, Nelung Dina, Mitung Dina, Matang Puluhan, Nyatus Dina, Mendak Pisan, Mendak pindho, Nyewu Dina dan Haul (kol). Kegiatan ini memiliki sedikit kesamaan dalam tujuan namun berbeda makna dan ritual yang dilaksanakan.

Gambakr 2. 5 Kegiatan Upacara Tradisi Daur Hidup



Sumber: Profil Kalurahan Wijirejo 2024.

c. Kesenian dan Permainan Rakyat

Kesenian tradisional merupakan tujuan yang akan menjadi sebuah tolak ukur untuk ketahanan tradisi di Kalurahan Wijirejo. Kesenian di kalurahan wijirejo dibagi menjadi dua bagian yaitu kesenian pertunjukan dan kesenian non pertunjukan. Kesenian pertunjukan dibagi menjadi

beberapa bagian yakni: Karawitan, Kethoprak, Sholawat Jawa, Sholawat Rodhat, Hadroh, Reog, Seni Musik (Qosidah modern), Pekbung, Jathilan, Sholawat Rebana. Kesenian non pertunjukan seperti Seni Ukir, Panahan, Membaktik, Pembuatan blangkon.

Permainan rakyat tidak sekadar hiburan, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai budaya, norma, dan adat kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh warga masyarakat kalurahan wijirejo. permainan rakyat yang sering dimainkan yakni : Egrang, Dakon, Bas-basan, Benthik, Gatheng, Bekelan, Gobag sodor, Nekeran, Sunda Manda/ ingkling.

Gambar 2. 6 Kesenian dan Pameran Rakyat



Sumber: Profil Kalurahan Wijirejo 2024.

Kesenian dan permainan rakyat di Kalurahan Wijirejo sangat beragam dan masih terjaga hingga kini. Pek Bung menjadi ikon kesenian lokal yang unik dan sarat nilai budaya, sementara Kethoprak, Karawitan, Reog, Mocopat, dan Hadroh

memperkaya khasanah seni tradisi. Permainan rakyat seperti dakon dan berbagai lomba tradisional juga terus dilestarikan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan kebersamaan masyarakat Wijirejo

Gambar 2. 7 Kesenian dan Pameran Rakyat



Sumber: Profil Kalurahan Wijirejo 2024.

d. Bahasa, Aksara dan Sastra

Kalurahan wijirejo juga memiliki cerita rakyat kurang lebih ada 15 cerita yang masih terus di jaga sebagai ajang asal mulanya sebuah fenomena yang terjadi di Kalurahan Wijirejo diantaranya, Asal nama tempat "Kadek Rawa" cerita ini tentang Sultan Trenggono/Panembahkan Bodho diperintahkan supaya mengembakra mengajarkan agama Islam di kawasan barat daya, timur Sungai Progo. Suatu saat sampailah di tempat yang masih banyak dijumpai rawa-rawa, maka disebutlah menjadi Kadek Rawa.

Adapun cerita rakyat tentang Asal nama tempat "Kadek Dhawuk" menceritakan tentang Tidak jauh dari Kadek Rawa terdapat beberapa warga memelihara kuda dengan warna khas putih, pada bagian leher sampai kepala berbulu hitam kehitaman, maka disebutlah kelak sebagai Kadek Dhawuk. Dan masih ada cerita rakyat lainnya diantaranya: Asal mula tempat "Kadek Sunthi", Asal nama tempat "Nglarang", Asal nama tempat "Gunung Sepikul", Asal nama tempat "Batikan", Asal nama tempat "Kauman", Asal nama tempat "Pawijenan", Asal nama tempat "Ngeblak", Asal nama tempat "Gesikan", Asal nama tempat "Karang Benyo", Asal nama tempat "Wijirejo", Sumur Kyai Jalak, Sungai Bedhog, Drembogo "Mbogo" (Ngentak Kauman).

Gambakr 2. 8 Bahasa, Aksara dan Sastra



Sumber: Profil Kalurahan Wijirejo 2024.

e. Penataan Ruang & Bangunan Serta Warisan Budaya

Warisan budaya (Makam Panembakhan Bodho) yang juga dikenal sebagai Makam Sewu, Panembakhan Bodho memiliki nama asli Raden Trenggono, juga dikenal dengan julukan Ki Joko Bodo di kalurahan wijirejo. Ia adalah tokoh penyebar agama Islam pertama di wilayah Bantul. Julukan "Bodho" diberikan karena ia memilih meninggalkan hak waris atas tahta Adipati di Terung Sidoarjo (bagian dari Kadipaten Majapahit terakhir) dan lebih memilih untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa nama "Bodho" diberikan oleh Sunan Kalijaga, gurunya, sebagai bentuk sindiran atau pelajaran spiritual

Selanjutnya warisan budaya Makam Nyai Brintik adalah salah satu warisan budaya yang masih dijaga dan dilindungi oleh pemerintah kalurahan wijirejo, Nyai Brintik dikenal sebagai tokoh legendaris yang memiliki kisah panjang dan sarat nilai budaya serta spiritual

Masih ada berbagai peninggalan warisan budaya kurang lebih 15 peninggalan warisan budaya (benda, situs, bangunan dan struktur) yaitu sebagai berikut: Besik Brintik, Upacara siraman pusaka, Upacara Labuhan, Nyadran Nyai Brintik dan Takjil bubur, peninggalan warisan budaya ini masih terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat,

serta partisipasi masyarakat yang begitu kental untuk kemajuan rintisan budaya di Kalurahan wijirejo

Gambakr 2. 9 Penataan Ruang & Bangunan Serta Warisan Budaya



Sumber: Profil Kalurahan Wijirejo 2024.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENGEMBANGKAN KALURAHAN RINTISAN BUDAYA

Pada bab ini, peneliti akan membahas dan menganalisis secara khusus terkait Pemerintahan Kalurahan Dalam Mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo. Perkembakngan potensi suatu Kalurahan tidak terlepas dari peran penting pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pada bab sebelumnya peneliti telah menguraikan beberapa poin penting tentang proses Kalurahan/kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya dengan beberapa kategori-kategori dan kondisi keadaan objektif Kalurahan yang dapat di analisis sebagai bahan perbandingan peneliti untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat. Beberapa hal penting di atas memiliki korelasi dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kalurahan Budaya yang telah diatur secara khusus untuk mengembangkan serta mempertahankan katahanan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun beberapa peraturan-peraturan yang mengkaji secara umum tentang kebudayaan bertujuan untuk mendorong Kalurahan/Kalurahan tumbuh dan berkembang, menjaga budaya serta dapat mengembangkan potensi-potensi Kalurahan yang dimiliki.

A. Program pemerintah kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di kalurahan wijirejo

Kalurahan Rintisan Budaya merupakan predikat yang diraih melalui serangkaian proses di bidang kebudayaan. Kalurahan Wijirejo memiliki pedoman dan aturan tersendiri terkait status Kalurahan Rintisan Budaya, yang

mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kalurahan Rintisan Budaya, serta diatur lebih lanjut melalui Keputusan Lurah Wijirejo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengurus Pengelolaan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo, setelah mendapatkan SK Bupati Bantul.

Dengan adanya regulasi tersebut, Kalurahan Wijirejo dapat dengan mudah membakgi tugas dan fungsi setiap bidang dalam kepengurusan Rintisan Budaya sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Sistem pembakgian ini memungkinkan pengelolaan Kalurahan Rintisan Budaya berjalan optimal, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya, tradisi, seni, pengembangan kuliner, pelestarian warisan budaya, pengobatan tradisional, dan aspek lainnya. Seluruh upaya ini tidak terlepas dari kolaborasi dengan masyarakat yang memiliki keahlian di bidangnya, sehingga tercipta keseimbangan dan kepentingan bersama bagi warga lokal. Selain itu, hal ini juga mendorong terciptanya kerukunan sosial serta semangat gotong royong antara masyarakat dan pemerintah Kalurahan.

Rintisan budaya merupakan sebuah pembentukan yang bertujuan untuk dikembangkan. Di dalamnya terdapat berbagai aktifitas yang harus dibangun serta dikelola melalui berbagai pertunjukan yaitu kesenian, kuliner, wisata, warisan budaya, bahan-bahan pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Dari berbagai aktifitas atau pertunjukan tersebut dapat menjadi acuan serta membakwa nilai yang positif terhadap Kalurahan dan mencapai tujuan yang ditargetkan.

Rintisan Budaya sendiri adalah sebuah proses pembentukan yang bertujuan untuk dikembangkan lebih lanjut. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang harus dibangun dan dikelola, seperti pertunjukan seni, pengembangan kuliner, wisata, pelestarian warisan budaya, pemanfaatan bahan pengobatan tradisional, dan lain sebagainya. Beragam aktivitas tersebut dapat menjadi tolok ukur serta memberikan dampak positif bagi Kalurahan, sekaligus membakntu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap aktivitas yang dilakukan selalu melalui tahapan yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari kerja keras pemerintah Kalurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Seluruh tahapan tersebut sudah diatur dalam pemerintahan Kalurahan, terkait tugas dan kewenangan dalam merancang serta melaksanakan program-program pengembangan Rintisan Budaya kalurahan Wijirejo.

Dalam wawancara mendalam bersama Bapak Heri Sujoko selaku Kaur Dinarta sekaligus sebagai pengurus rintisan budaya di kalurahan wijirejo menyampaikan bahwa :

“jadi mbak untuk mengenai program-program ini Pemerintah Kalurahan Wijirejo tidak terlepas dari aspek penganggaran, terutama dalam mendukung kegiatan di Kalurahan Rintisan Budaya. Kami menganggarkan lima bidang kegiatan, mulai dari bidang tradisi hingga bidang warisan budaya, yang semuanya dialokasikan melalui APBDes. Selain itu, kami juga berupaya mengoptimalkan peran pengurus Kalurahan Rintisan Budaya agar dapat berbaur dan berperan aktif di masyarakat. Sebenarnya, sebagian besar kegiatan di Kalurahan Rintisan Budaya sudah dilaksanakan secara mandiri oleh warga, tanpa pembiayaan dari pemerintah Kalurahan. Seperti kegiatan acara mitoni dan kegiatan tradisional lainnya”.(wawancara 9/05/2025)

Menurut pernyataan Bapak Heri Sujoko dapat disimpulkan bahwa program pemerintah dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo berjalan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan melalui APBDes untuk lima bidang kegiatan budaya, mulai dari tradisi hingga warisan budaya. Pengurus Kalurahan rintisan budaya dioptimalkan agar lebih aktif berbaur dengan masyarakat, sementara kegiatan budaya seperti mitoni sudah dijalankan secara mandiri oleh warga tanpa pembiayaan langsung dari pemerintah. Dengan demikian, program ini berhasil memadukan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal secara berkelanjutan.

Adapun pernyataan di atas dipertegas oleh Bapak Edi Rianto selaku Ketua Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak terkait program itu Pemerintah Kalurahan sangat aktif melaksanakan berbagai program dalam rangka mengembangkan rintisan budaya. Dan program utama yang dijalankan yaitu penyelenggaraan festival budaya secara rutin, seperti festival ketoprak, reog, dan kesenian tradisional dan masih banyak lagi, yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal”.(Wawancara 09/05/2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Rianto Ketua Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo kembali menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Wijirejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan melestarikan budaya lokal melalui berbagai program yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah penyelenggaraan festival budaya secara rutin, seperti festival ketoprak, reog, dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Festival-festival ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai media penting untuk

mempertahankan dan mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Selain itu, program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kalurahan juga mencakup pembinaan dan pelatihan kesenian tradisional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni dan masyarakat dalam menguasai serta mengembangkan seni budaya yang ada.

Melalui dukungan anggaran, pelaksanaan festival budaya, dan pelatihan kesenian, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian budaya lokal. Ini tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian Kalurahan melalui pariwisata budaya

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wisnu Rianto selaku Lurah di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak Pertama, kami berupaya menghidupkan kembali potensi-potensi budaya di Kalurahan Wijirejo yang selama ini sempat tidak aktif atau kurang dilaksanakan oleh masyarakat, seperti permainan anak-anak dan tradisi-tradisi lainnya, misalnya piur dan sesorak. Sebagai upaya pemerintah, kami memberikan fasilitas berupa pelatihan-pelatihan, khususnya pelatihan sesorak atau pranoto coro yang masih berjalan hingga saat ini. Kedua, kami juga memberikan dukungan dan fasilitas kepada masyarakat apabila mengadakan pentas kesenian. kami turut memberikan kontribusi berupa subsidi atau bantuan, baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dari pemerintah Kalurahan, untuk mendukung kelancaran dan keberlangsungan kegiatan seni budaya”.(Wawancara 25/06/2025)

Dari pernyataan ini Menggambarkan bahwa Pemerintah Kalurahan Wijirejo berkomitmen untuk menghidupkan kembali potensi budaya lokal yang sempat tidak aktif, terutama tradisi dan permainan anak-anak seperti piur dan sesorak. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan-

pelatihan budaya yang relevan, seperti pelatihan pranoto soro. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan berupa fasilitas dan bantuan dana kepada masyarakat yang mengadakan pentas kesenian, baik dari sumber anggaran Kalurahan maupun kabupaten, guna memastikan kelangsungan dan pengembangan seni budaya di Kalurahan Wijirejo. Dengan demikian, pemerintah Kalurahan berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui dukungan yang konkret dan berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bintoro selaku Kasih Ulu-Ulu di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“iya banyak ya mbak, pembinaan budaya itu semua kita ada anggaran untuk festifal budaya, seperti ketoprak ada kesenian ada reok dan lain-lain itu kita sering adakan kegiatan termasuk kita mengadakan pelatihan kalau bahasa jawa itu pranoto coro atau pengacara khusus bahasa jawa, itu kita ada pelatihannya dan juga di anggarkan”.(Wawancara 09/05/2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pembinaan budaya di Kalurahan telah dilakukan secara aktif dan berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah Kalurahan secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya seperti festival ketoprak, pertunjukan kesenian, reog, dan bentuk kesenian tradisional lainnya. Selain itu, Kalurahan juga menyelenggarakan pelatihan khusus seperti pranoto coro atau pembakwa acara dalam bahasa Jawa, yang menunjukkan perhatian terhadap pelestarian bahasa dan adat lokal. Semua kegiatan ini telah menjadi bagian dari program yang terstruktur dan dibiayai secara resmi, mencerminkan keseriusan Kalurahan dalam membina dan mengembangkan potensi budaya daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muji Lestari selaku Ketua Banmuskal Wijirejo sekaligus sebagai pengurus rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak kalurahan wijirejo meraih predikat rintisan itu tahun 2023. Sebagai Kalurahan rintisan, fokus utama saat ini sebagai program pemerintah itu tahap penataan untuk menuju status Kalurahan budaya. Penataan yang dilakukan pengelolaan kelompok kesenian dan kegiatan budaya yang belum memiliki Nomor Induk Kesenian (NIK). Pemerintah kalurahan memfasilitasi pendataan dan pengurusan NIK agar kelompok seni bisa mengakses dana khusus budaya”.(Wawancara 25/06/2025)

Pernyataan ini menggambarkan bahwa Pemerintah kalurahan secara aktif memfasilitasi proses pendataan dan pengurusan NIK bagi kelompok-kelompok seni tersebut. Langkah ini sangat strategis karena dengan memiliki NIK, kelompok seni dapat mengakses berbagai dana khusus budaya yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga terkait lainnya. Pendanaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seni dan budaya, pelatihan, serta pengembangan kapasitas para pelaku seni di Kalurahan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat eksistensi budaya lokal, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan seni dan budaya.

Selain itu, penataan ini juga berfungsi untuk memperbaiki tata kelola dan organisasi kelompok kesenian agar lebih profesional dan terstruktur. Hal ini penting agar kegiatan budaya yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, terjadwal, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang baik, Kalurahan rintisan budaya dapat menjadi contoh bagi Kalurahan-Kalurahan lain dalam mengembangkan potensi budaya mereka.

Secara keseluruhan, program pemerintah di Kalurahan Wijirejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pelestarian budaya melalui pendekatan yang sistematis dan terencana. Melalui fasilitasi administrasi seperti pengurusan NIK dan pendataan kelompok seni, pemerintah menciptakan fondasi yang kokoh bagi pengembangan budaya lokal yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat identitas budaya Kalurahan, serta membuka peluang baru dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata budaya.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Rini Aliah selaku Tokoh Masyarakat di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“iya jadi pemerintah kalurahan wiji rejo dalam meningkatkan Kalurahan rintisan budaya itu ada beberapa program ya yang di lakukan seperti di setiap tahun itu pemerintah kalurahan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti makam sewu itu ada kegiatan nyadran dan berikutnya itu setiap dusun itu sudah mempunyai seperti kelompok untuk kesenian seperti reog, jatilan dan lain-lain bahkan ada juga kelompok hadroh serta yang di lakukan oleh anak mudah di wilayah kalurahan wijirejo”.(Wawancara 25/06/2025)

Pernyataan ini Menggambarkan bahwa Pemerintah Kalurahan Wijirejo aktif dalam meningkatkan Kalurahan rintisan budaya melalui berbagai program. Setiap tahun, pemerintah menyelenggarakan kegiatan keagamaan tradisional seperti nyadran di Makam Sewu sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal. Selain itu, setiap dusun di wilayah kalurahan telah membentuk kelompok kesenian tradisional, seperti reog, jatilan, dan hadroh, yang juga melibatkan peran aktif anak muda. Program-program ini menunjukkan komitmen pemerintah Kalurahan dalam menjaga dan mengembangkan

budaya serta melibatkan masyarakat secara luas, khususnya generasi muda, dalam pelestarian tradisi budaya di Kalurahan Wijirejo.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Kalurahan Wijirejo berhasil meraih predikat Kalurahan Rintisan Budaya dengan dasar regulasi yang jelas dan pengelolaan terstruktur melalui pembentukan pengurus khusus. Pemerintah Kalurahan secara aktif mendukung pengembangan budaya lokal melalui alokasi anggaran APBDes untuk berbagai bidang budaya, penyelenggaraan festival seni tradisional, pelatihan kesenian, serta fasilitasi pendataan dan pengurusan Nomor Induk Kesenian (NIK) bagi kelompok seni. Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelestarian budaya, termasuk pelaksanaan tradisi dan kegiatan seni secara mandiri. Program ini tidak hanya menghidupkan kembali potensi budaya yang sempat redup, tetapi juga melibatkan generasi muda dalam berbagai kelompok kesenian di tingkat dusun. Dengan dukungan fasilitas, subsidi, dan pelatihan yang berkelanjutan, Kalurahan Wijirejo berhasil menciptakan lingkungan kondusif untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.



Foto Dokumentasi: Sosialisasi dan pelaksanaan program Kalurahan

Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

B. Pemanfaatan anggaran dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo

Rintisan Kalurahan Budaya merupakan program strategis Gubernur DIY yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kabupaten atau Kota dengan pembiayaan melalui Dana Keistimewaan DIY. Adapun tujuan pembentukan Rintisan Kalurahan Budaya adalah bentuk upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan potensi budaya di Kalurahan/Kalurahan.

Pemanfaatan anggaran dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya dilakukan secara partisipatif dan berbasis kearifan lokal, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana Kalurahan. Anggaran ini diarahkan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya lokal melalui kegiatan seperti festival budaya, pelatihan seni, dan penguatan lembaga adat.

Pengelolaan dana Kalurahan harus memperhatikan karakteristik sosial dan budaya setempat agar program yang dijalankan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Kalurahan tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan budaya sebagai sumber daya pembangunan

Dalam wawancara mendalam bersama Bapak Heri Sujoko selaku Kaur Dinarta sekaligus sebagai pengurus rintisan budaya di kalurahan wijirejo menyampaikan bahwa :

“jadi mbak untuk pemanfaatan anggaran kami alokasikan pada tiga bidang, salah satunya itu bidang pembinaan kemasyarakatan. Penyaluran anggaran itu melalui pengurus kebudayaan yang telah terbentuk, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta ketua bidang satu hingga ketua bidang lima. Stuktur kepengurusan ini kami bentuk sebagai stimulan. Jadi pada setiap kegiatan rutin seperti perayaan di makam sewu dan festifal ketoprak klasik, kami memberikan dukungan bantuan dana”.(Wawancara 9/05/2025)

Menurut pernyataan Bapak Heri Sujoko dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran di Kalurahan rintisan budaya telah dialokasikan secara terarah pada tiga bidang utama, salah satunya adalah bidang pembinaan kemasyarakatan. Penyaluran anggaran dilakukan melalui struktur kepengurusan kebudayaan yang telah dibentuk, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa ketua bidang. Struktur ini berfungsi sebagai stimulan agar pengelolaan kegiatan budaya berjalan lebih terorganisir dan partisipatif.

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan rutin Kalurahan, seperti perayaan di makam sewu dan festival ketoprak klasik, dengan memberikan bantuan dana kepada panitia pelaksana. Hal ini

menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran di Kalurahan rintisan budaya tidak hanya berfokus pada pelestarian tradisi dan kegiatan budaya, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang transparan dan terstruktur ini diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Kalurahan serta meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun pernyataan di atas dipertegas oleh Bapak Edi Rianto selaku Ketua Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak Pemerintah Kalurahan Wijirejo melaksanakan program seperti memfasilitasi kegiatan budaya lewat pentas budaya, pentas wulanan, pentas seni tradisi, jathilan atau reyog, solawatan, kethoprak 10 pedukuhan dan lain-lain. Tiap kelompok diberi stimulan dana untuk pentas dan mengembangkan seninya. Dan mengadakan pelatihan dengan mengundang Narsum yang relevan. Diberikan dana stimulan 2-3 juta per triwulan untuk stimulan kegiatan seni-budaya di Wijirejo”.(Wawancara 09/05/2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Rianto Ketua Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo kembali menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Wijirejo secara aktif memfasilitasi dan mendukung pelestarian serta pengembangan budaya lokal melalui berbagai program, seperti pentas budaya, pentas wulanan, pentas seni tradisi, jathilan atau reyog, solawatan, dan kethoprak di sepuluh pedukuhan. Setiap kelompok seni di Kalurahan diberikan dana stimulan sebesar 2-3 juta rupiah per triwulan untuk mendukung pelaksanaan pentas dan pengembangan seni mereka. Selain itu, Kalurahan juga rutin mengadakan pelatihan dengan menghadirkan narasumber yang relevan untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni dan budaya. Pemanfaatan anggaran yang terstruktur ini menunjukkan komitmen

Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat melalui seni dan budaya, sekaligus menjaga kelestarian tradisi lokal agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bintoro selaku Kasih Ulu-Ulu di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak Kalurahan kami mengalokasikan anggaran dari Dana Kalurahan dan APBDes untuk pembinaan dan pengembangan budaya serta wisata religi, seperti Makam Sewu, Nyai Brintik, dan seni tradisional Macopat di pedukuhan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan budaya, pelatihan seni, serta acara tradisional seperti Ara Jodan dan Nyadranan, dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan potensi budaya lokal secara berkelanjutan”.(Wawancara 09/05/2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa, pemanfaatan anggaran dalam mengembangkan rintisan budaya menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Kalurahan dalam melestarikan dan mengembangkan potensi budaya lokal secara berkelanjutan. Kalurahan mengalokasikan dana dari Dana Kalurahan dan APBDes secara khusus untuk pembinaan dan pengembangan berbagai aspek budaya serta wisata religi yang menjadi ciri khas wilayahnya, seperti Makam Sewu, Nyai Brintik, dan seni tradisional Macopat yang tersebar di beberapa pedukuhan.

Dana tersebut digunakan secara strategis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan budaya yang rutin dan beragam, mulai dari pentas seni, pelatihan peningkatan kapasitas pelaku seni, hingga penyelenggaraan acara tradisional seperti Ara Jodan dan Nyadranan. Dengan adanya dukungan dana ini, masyarakat Kalurahan dapat menjaga kelestarian tradisi dan sekaligus mengembangkan kreativitas seni yang ada, sehingga budaya lokal tidak hanya

dipertahankan tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pengelolaan anggaran yang terstruktur dan terencana ini juga memperlihatkan bahwa Kalurahan mampu mengintegrasikan aspek budaya dengan pembakngunan ekonomi dan sosial. Kegiatan budaya yang didukung oleh anggaran Kalurahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian, tetapi juga sebagai potensi penggerak ekonomi lokal melalui wisata budaya dan religi yang menarik minat pengunjung. Selain itu, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dengan dana Kalurahan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang seni dan budaya, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi budaya secara mandiri.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wisnu Rianto selaku Lurah di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak tidak jauh beda seperti yang pertama, kita memberikan suport dukungan baik itu materil maupun inmatril yang itu wujudnya adalah partisipasi pemerintah dalam rangkah mendukung adanya Kalurahan rintisan budaya di tingkat pedukuhan”.(Wawancara 25/06/2025)

Dari pernyataan ini Menggambarkan bahwa pemanfaatan anggaran dalam pengembangan Kalurahan rintisan budaya dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Pemerintah Kalurahan tidak hanya memberikan dukungan berupa bantuan materiil, seperti dana stimulan untuk kegiatan seni dan budaya, tetapi juga dukungan imaterial yang mencakup fasilitasi, pendampingan, dan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan budaya di tingkat pedukuhan.

Dukungan materiil yang diberikan berupa alokasi dana yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seni tradisional seperti pentas budaya, pentas wulanan, jathilan, reyog, solawatan, dan kethoprak. Dana stimulan ini memungkinkan kelompok seni di pedukuhan untuk mengembangkan kreativitas dan mempertahankan tradisi budaya secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah Kalurahan juga mengadakan pelatihan dan workshop dengan menghadirkan narasumber yang relevan, guna meningkatkan kapasitas pelaku seni dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan budaya di Kalurahan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan acara, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat.

Dukungan inmaterial berupa partisipasi aktif pemerintah Kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan budaya di tingkat pedukuhan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung, sehingga program pengembangan budaya dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal. Partisipasi pemerintah juga menjadi stimulan bagi masyarakat untuk lebih bersemangat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya mereka.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muji Lestari selaku Ketua Banmuskal Wijirejo sekaligus sebagai pengurus rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak kemarin, di bidang saya yaitu bidang 3 yang membidangi bahasa dan sastra, kami mengajukan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan terkait panggih manten adat Jawa, khususnya manten Yogyakarta. Selain itu, di bidang adat, seni, dan tradisi juga dilaksanakan kegiatan panti oja-ojan yang membakhas berbagai hal berkaitan dengan budaya Jawa, seperti yang ada di Mandang,

misalnya kembakr mayang, dan sebagainya, yang menjadi bagian dari penafsiran budaya tersebut. Semua kegiatan ini di fasilitasi dan diberikan anggaran, dan anggaran ini diakses dari Dana IS meskipun nominalnya belum besar, yaitu masih di bawah 10 juta rupiah per bidang. Seperti itu gambarkan pemanfaatan anggaran di bidang kami untuk mendukung pelestarian budaya Jawa”.(Wawancara 25/06/2025)

Dari pernyataan ini Menggambarkan bahwa pemanfaatan anggaran dalam pengembangan rintisan budaya di Kalurahan ini telah berjalan secara terstruktur dan menyentuh berbagai aspek penting pelestarian budaya Jawa. Salah satu contoh nyata adalah di bidang bahasa dan sastra, di mana anggaran diajukan dan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan adat seperti panggih manten Jawa, khususnya manten Yogyakarta, yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, mengenai nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, di bidang adat, seni, dan tradisi, pemerintah Kalurahan juga mendukung kegiatan panti oja-ojan yang membakhas unsur-unsur budaya seperti persajenan, kembakr mayang, dan berbagai simbol adat lainnya yang sarat makna filosofis dan spiritual bagi masyarakat Jawa.

Semua kegiatan tersebut difasilitasi dan didukung oleh anggaran yang diakses dari Dana Istimewa (Dana IS), meskipun jumlahnya masih terbatas, yaitu di bawah 10 juta rupiah per bidang. Walaupun nominalnya belum besar, alokasi dana ini sangat berarti untuk menjaga kesinambungan kegiatan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat identitas dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Dukungan dana ini juga memungkinkan pelaksanaan pelatihan, workshop, dan berbagai program penguatan kapasitas pelaku budaya, sehingga pelestarian budaya tidak hanya

bersifat seremonial, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.



Foto Dokumentasi: Pelaksanaan program Kalurahan Rintisan Budaya

Kalurahan Wijirejo

C. Kebijakan pemerintahan Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo

Kebijakan pemerintahan Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya merupakan upaya strategis yang terarah untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya. Pemerintah Kalurahan menetapkan program dan regulasi yang mendukung penguatan adat, seni, bahasa, kuliner, kerajinan, serta tata ruang dan cagar budaya di wilayahnya. Melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati, seperti Perbup Bantul Nomor 136 Tahun 2020, Kalurahan diberi pedoman dalam proses penetapan, pengelolaan, dan pendanaan rintisan Kalurahan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran dari Dana Kalurahan, APBDes, dan sumber dana lain untuk membiayai berbagai kegiatan budaya, termasuk pelatihan, pentas seni tradisional, pengembangan wisata budaya dan religi, serta pembinaan kelompok kesenian dan adat. Pendekatan kebijakan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor agar pelestarian budaya berjalan berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah Kalurahan juga melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap potensi budaya yang ada sebagai bagian dari proses menuju status Kalurahan budaya mandiri. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya adiluhung, tetapi juga mengintegrasikan inovasi dan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan budaya dan ekonomi kreatif. Melalui kebijakan yang komprehensif ini, Kalurahan rintisan budaya diharapkan mampu menjadi pusat pelestarian budaya sekaligus penggerak pembangkitan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam wawancara mendalam bersama Bapak Bapak Muji Lestari selaku Ketua Banmuskal Wijirejo sekaligus sebagai pengurus rintisan budaya di kalurahan wijirejo menyampaikan bahwa :

“iya mbak jadi kebijakan kami untuk mengembangkan Kalurahan rintisan budaya itu ada penetapan rintisan Kalurahan budaya ada juga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan dan selanjutnya ada pengembangan ekosistem kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan profil kebudayaan kalurahan seperti itu mbak”.(Wawancara 25/06/2025)

Menurut pernyataan Bapak Muji Lestari dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya menerapkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi penetapan status rintisan Kalurahan budaya, pembinaan dan pendampingan masyarakat, pengembangan ekosistem kebudayaan, serta pemberdayaan masyarakat secara aktif. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal sekaligus mengoptimalkan potensi budaya sebagai modal sosial dan ekonomi Kalurahan. Melalui pembinaan dan pendampingan, pemerintah Kalurahan memberikan dukungan teknis dan fasilitasi agar masyarakat dapat mengelola dan mengembangkan seni, adat, tradisi, serta aspek budaya lainnya secara mandiri dan partisipatif.

Selain itu, pengelolaan profil kebudayaan kalurahan menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan dan mempromosikan identitas budaya Kalurahan. Dengan pendekatan ini, Kalurahan rintisan budaya tidak hanya menjadi pusat pelestarian nilai-nilai tradisional, tetapi juga menjadi motor penggerak pembakngunan sosial dan ekonomi berbasis budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut selaras dengan upaya pemerintah daerah dan nasional dalam mendorong Kalurahan-Kalurahan untuk menjadi mandiri secara budaya dan ekonomi, serta menjaga keberagaman budaya di tengah dinamika modernisasi.

Adapun pernyataan di atas dipertegas oleh Bapak Edi Rianto selaku Ketua Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak kami 10 pedukuhan di Wijirejo diwajibkan mempunyai group seni dan juga mempunyai NIK di Dinas kebudayaan Bantul, sehingga setiap kegiatan bisa dimintakan dana dari kabupaten. Setiap pedukuhan punya jadwal latihan seni budaya dan dipantau

langsung oleh Kalurahan lewat dewan budaya. Setiap ada even lomba tiap pedukuhan harus mengikuti pentas, dievent ulang tahun Kalurahan, atau event upacara tradisi budaya seperti nyadran makamsewu seperti itu mbak”.(Wawancara 09/05/2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Rianto Ketua Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo kembakli menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Wijirejo menerapkan kebijakan yang sistematis dan terstruktur dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya dengan mewajibkan setiap dari 10 pedukuhan memiliki kelompok seni yang terdaftar secara resmi di Dinas Kebudayaan Bantul melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan ini memungkinkan setiap kelompok seni untuk mengakses dana dari pemerintah kabupaten guna mendukung kegiatan budaya di tingkat pedukuhan. Selain itu, setiap pedukuhan diwajibkan memiliki jadwal latihan seni budaya yang dipantau secara langsung oleh pemerintah Kalurahan melalui Dewan Budaya, sehingga pelaksanaan pembinaan seni berjalan teratur dan terkontrol.

Pemerintah Kalurahan juga menetapkan bahwa setiap pedukuhan harus aktif berpartisipasi dalam berbagai event budaya, seperti lomba seni, perayaan ulang tahun Kalurahan, serta upacara tradisi budaya penting seperti Nyadran di Makam Sewu. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pedukuhan terlibat secara aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya Kalurahan secara kolektif. Dengan pengelolaan yang terorganisir dan dukungan pemerintah kabupaten, kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat eksistensi dan keberlanjutan Kalurahan rintisan budaya di Wijirejo, selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam

menguatkan manajemen dan pengelolaan rintisan Kalurahan budaya demi mencapai status Kalurahan Mandiri Budaya.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Rini Aliah selaku Tokoh Masyarakat di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak mengenai kebijakan pemerintah ini kami lihat contoh kemarin itu mahasiswa yang KKN pemerintah kalurahan mengharuskan mahasiswa KKN itu ada kegiatan atau peran, bentuknya yang mendukung untuk mensukseskan rintisan itu yang pertama mahasiswa KKN yang ada di pedukuhan itu wajib membuat plangisasi seperti nama jalan dengan menggunakan huruf jawa atau bahasa jawa. Trus kedua ada juga yang mengadakan kemarin kegiatan pranoto coro yaitu pelatihan MC jawa ada juga yang mengadakan seperti itu trus ada juga terkait dengan memberdayakan generasi mudah di pedukuhan itu tentang pelestarian adat jadi seperti itu mbak salah satu kebijakan yang di ambil pemerintah”.(Wawancara 25/06/2025)

Dari pernyataan ini Menggambarkan bahwa penerapan kebijakan yang inovatif dan partisipatif dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya, dengan menekankan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Salah satu kebijakan utama adalah mewajibkan mahasiswa KKN yang ditempatkan di pedukuhan untuk berkontribusi secara nyata dalam pelestarian budaya, seperti membuat papan nama jalan (plangisasi) menggunakan huruf atau bahasa Jawa. Langkah ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat agar lebih mengenal dan mencintai warisan budaya sendiri.

Selain itu, pemerintah Kalurahan juga mendorong pelaksanaan pelatihan pranoto coro (MC Jawa) yang bertujuan meningkatkan kapasitas generasi muda dalam menguasai tata cara dan bahasa formal dalam acara adat. Kegiatan ini penting untuk memastikan tradisi lisan dan tata upacara adat tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tidak hanya itu,

pemerintah Kalurahan juga aktif memberdayakan generasi muda melalui berbagai kegiatan pelestarian adat di tingkat pedukuhan, sehingga nilai-nilai tradisi tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah Kalurahan Wijirejo untuk tidak hanya melestarikan budaya secara seremonial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui peran aktif, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, Kalurahan rintisan budaya di Wijirejo tidak hanya menjadi pusat pelestarian budaya, tetapi juga menjadi motor penggerak pembakngunan sosial yang berbasis pada kekuatan tradisi lokal, sekaligus menciptakan ekosistem budaya yang adaptif, dinamis, dan berkelanjutan di tingkat Kalurahan.

Berdasarkan hasil Penelitian, peneliti menemukan bahwa Kebijakan pemerintah Kalurahan Wijirejo dalam mengembangkan Kalurahan rintisan budaya terbukti komprehensif dan berkelanjutan. Melalui penetapan status rintisan budaya, pembinaan, pendampingan, pengembangan ekosistem kebudayaan, serta pemberdayaan masyarakat dan generasi muda, Kalurahan mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal. Kebijakan ini tidak hanya melestarikan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, memperkuat identitas Kalurahan, dan menciptakan ekosistem budaya yang adaptif dan dinamis.



Foto Dokumentasi: Sosialisasi dan penetapan kebijakan terkait Kalurahan
Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

D. Aturan terkait dengan rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo

Untuk mengembangkan rintisan budaya, tidak terlepas dari serangkaian regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya. Aturan-aturan tersebut merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola, pengelolaan, serta pengembangan potensi budaya lokal di wilayah ini.

Untuk mengetahui aturan-aturan dalam pengembangan rintisan budaya peneliti mencoba mendalami dengan cara mewawancarai pengurus kalurahan dan pengurus kebudayaan yang akan dapat memberikan informasi yang cukup akurat yaitu Bapak Heri Sujoko selaku Kaur Dinarta sekaligus sebagai pengurus rintisan budaya di kalurahan wijirejo menyampaikan bahwa :

“jadi mbak rintisan budaya ini didukung oleh peraturan Kalurahan yang didalamnya menegaskan bahwa budaya tidak hanya terbatas pada seni pertunjukan, tetapi juga mencakup berbagai aspek warisan adiluhung dari nenek moyang, seperti ketoprak, reog, dan solawatan. Kegiatan budaya yang telah berlangsung sejak lama terus dipertahankan, tidak hanya sebagai upaya pelestarian, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat”.(Wawancara 9/05/2025)

Menurut pernyataan Bapak Heri Sujoko dapat disimpulkan bahwa program Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo didukung oleh peraturan Kalurahan yang menegaskan bahwa budaya tidak hanya sebatas seni pertunjukan, tetapi mencakup berbagai warisan adiluhung dari nenek moyang seperti ketoprak, reog, dan solawatan. Kegiatan budaya yang telah lama berlangsung terus dipertahankan sebagai upaya pelestarian sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan demikian, pengembangan budaya di Kalurahan ini berjalan secara menyeluruh, mengintegrasikan aspek pelestarian nilai-nilai tradisional dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

Adapun pernyataan di atas dipertegas oleh Bapak Edi Rianto selaku Ketua Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak untuk aturan Kalurahan rintisan budaya itu tentunya ada ya dari perdes sendiri dan peraturan kabupaten itu sudah ada semua, jadi kami hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan”.(
Wawancara 09/05/2025)

Dari pernyataan ini Menggambarkan bahwa aturan terkait Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo telah diatur secara resmi melalui Peraturan Kalurahan dan Peraturan Kabupaten yang berlaku. Pemerintah Kalurahan Wijirejo menjalankan program dan kegiatan budaya dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan budaya di Kalurahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kalurahan Wijirejo menjalankan

peranannya sebagai Kalurahan Rintisan Budaya berdasarkan aturan yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan daerah.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wisnu Rianto selaku Lurah di Kalurahan Wijirejo, menyampaikan:

“jadi mbak kalau aturan jelas kita mengikuti aturan dari kabupaten dan provinsi. Jadi aturan tentu kita harus melalui tahapan-tahapan ada tahapan verifikasi, verifikasi lapangan ada tahapan penyusunan karena Kalurahan rintisan budaya itu pertama bekalnya adalah kita punya budaya yang sudah ada kita uri-uri kita kembangkan kita jaga kita dukung yang kedua nanti kita dukung dengan anggaran dana yang ketiga kita jadikan arsip Kalurahan dan kita pentaskan jadi modelnya seperti itu mbak”.(Wawancara 25/06/2025)

Dari pernyataan ini Menggambarkan bahwa aturan terkait Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Proses pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi lapangan. Tahapan ini memastikan bahwa Kalurahan memiliki budaya yang sudah ada sebagai modal utama yang terus diuri-uri, dikembangkan, dan dijaga keberlangsungannya.

Selanjutnya, pengembangan budaya tersebut didukung dengan alokasi anggaran khusus dari pemerintah Kalurahan. Selain itu, seluruh kegiatan budaya yang dilaksanakan juga didokumentasikan dan dijadikan arsip Kalurahan sebagai bentuk pelestarian. Akhirnya, budaya tersebut dipentaskan secara rutin sebagai wujud nyata pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Model ini menjadi kerangka kerja yang diterapkan di Kalurahan Wijirejo dalam menjalankan program Kalurahan Rintisan Budaya secara terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Kalurahan Wijirejo mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya berdasarkan regulasi yang jelas dari Peraturan Kalurahan, Kabupaten, dan Provinsi. Program ini menekankan pelestarian budaya tradisional seperti ketoprak, reog, dan solawatan, yang tidak hanya berfungsi sebagai seni pertunjukan tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program melalui tahapan verifikasi, pengembangan budaya yang sudah ada, dukungan anggaran, pendokumentasian, dan pentas rutin, menjadikan pengelolaan budaya di Wijirejo terstruktur dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan daerah.



Foto Dokumentasi: Pertemuan Pengurus Rintisan Budaya Kalurahan Wijirejo

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan berbagai hal penting yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan terkait pendekatan serta peran Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan secara umum bahwa Pemerintah Kalurahan dalam Mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo

1. Program pemerintah Kalurahan Wijirejo dalam mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan dasar regulasi yang jelas, seperti Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Lurah Nomor 48 Tahun 2023. Pemerintah Kalurahan membentuk pengurus khusus yang membakgi tugas sesuai keahlian untuk mengelola berbagai bidang budaya, mulai dari seni pertunjukan, kuliner, pelestarian warisan budaya, hingga pengobatan tradisional. Dukungan anggaran dialokasikan melalui APBDes untuk lima bidang kegiatan budaya, sementara masyarakat juga aktif melaksanakan kegiatan secara mandiri. Pemerintah secara rutin menyelenggarakan festival budaya dan pelatihan kesenian untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni serta melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi. Selain itu, pemerintah memfasilitasi pendataan dan pengurusan Nomor Induk Kesenian (NIK) agar kelompok seni dapat mengakses dana khusus

budaya. Upaya ini menciptakan lingkungan kondusif bagi pelestarian budaya lokal yang tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat, Kalurahan Wijirejo berhasil menghidupkan kembali potensi budaya lokal dan menjadi contoh bagi pengembangan Kalurahan budaya lainnya.

2. Pemanfaatan anggaran dalam pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo dilakukan secara terstruktur, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal dengan dukungan dana dari Dana Keistimewaan DIY, Dana Kalurahan, dan APBDes. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembinaan kemasyarakatan, pelestarian seni dan tradisi, penguatan lembaga adat, serta pengembangan wisata religi seperti Makam Sewu dan Nyai Brintik. Pemerintah Kalurahan membentuk struktur kepengurusan kebudayaan yang mengelola penyaluran dana secara transparan dan terorganisir sebagai stimulan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan budaya, termasuk festival, pentas seni tradisional, pelatihan kesenian, serta acara adat seperti Ara Jodan dan Nyadranan. Dukungan anggaran ini tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi seni dan wisata budaya. Selain bantuan materiil berupa dana stimulan, pemerintah Kalurahan juga memberikan dukungan inmaterial berupa fasilitasi, pendampingan, dan partisipasi aktif dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan budaya di tingkat pedukuhan. Hal ini memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kapasitas pelaku seni, serta mendorong partisipasi luas dalam pelestarian budaya. Pemanfaatan anggaran juga menyentuh berbagai aspek budaya, termasuk bahasa dan sastra Jawa, dengan dukungan kegiatan adat seperti panggih manten dan panti oja-ojan yang mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai budaya lokal. Meskipun alokasi dana di beberapa bidang masih terbatas, komitmen pemerintah Kalurahan dalam mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan sangat terlihat melalui program-program yang berjalan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang terencana dan partisipatif ini berhasil memperkuat identitas budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kesinambungan pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya di Kalurahan Wijirejo.

3. Kebijakan pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Wijirejo dalam mengembangkan Kalurahan Rintisan Budaya merupakan upaya strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Kalurahan menetapkan regulasi dan program yang mendukung pelestarian serta pengembangan adat, seni, bahasa, kuliner, kerajinan, dan cagar budaya, dengan mengacu pada peraturan daerah dan bupati. Anggaran dari Dana Kalurahan, APBDes, dan sumber lain dialokasikan untuk membiayai pelatihan, pentas seni tradisional, pengembangan wisata budaya dan religi, serta pembinaan kelompok kesenian dan adat. Kebijakan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi

lintas sektor, termasuk pendataan dan pengelolaan Nomor Induk Kesenian (NIK) bagi kelompok seni agar dapat mengakses dana pemerintah kabupaten. Setiap pedukuhan diwajibkan memiliki kelompok seni yang rutin berlatih dan berpartisipasi dalam berbagai event budaya, seperti lomba seni dan upacara tradisi penting. Pemerintah Kalurahan juga melibatkan mahasiswa KKN dalam program budaya melalui kegiatan edukatif seperti pembuatan plang nama jalan beraksara Jawa dan pelatihan pranoto coro, guna memberdayakan generasi muda dalam melestarikan tradisi. Melalui kebijakan ini, Kalurahan Wijirejo tidak hanya menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat identitas Kalurahan. Pendekatan yang sistematis dan partisipatif ini menciptakan ekosistem budaya yang adaptif, dinamis, dan berkelanjutan, menjadikan Kalurahan rintisan budaya sebagai pusat pelestarian sekaligus motor penggerak pembakngunan sosial dan ekonomi berbasis budaya.

4. Aturan rintisan budaya di Kalurhan Wijirejo didasarkan pada regulasi yang jelas dan terintegrasi mulai dari tingkat Kalurahan, kabupaten, hingga provinsi. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pelestarian seni pertunjukan tradisional seperti ketoprak, reog, dan solawatan, tetapi juga mengakomodasi berbagai warisan budaya adiluhung yang menjadi modal utama Kalurahan. Pelaksanaan program dilakukan secara sistematis melalui tahapan verifikasi administrasi dan lapangan, pengembangan dan pemeliharaan budaya

yang sudah ada, dukungan anggaran khusus, pendokumentasian, serta pentas budaya secara rutin. Dengan pendekatan ini, Kalurahan Wijirejo berhasil menjalankan pengelolaan budaya yang terstruktur dan berkelanjutan, sekaligus memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui pelestarian budaya lokal yang selaras dengan kebijakan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang tercantum maupun yang tidak tercantum, ada beberapa hal yang masih memiliki kekurangan sehingga peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan Perlu adanya Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat, mendorong keterlibatan masyarakat lintas generasi, terutama generasi muda, perlu terus ditingkatkan pada setiap tahapan program budaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, program yang dijalankan akan lebih inklusif, relevan, dan berkelanjutan karena mencerminkan kebutuhan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
2. Perlu adanya Diversifikasi Sumber Pendanaan, Mendorong pengembangan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga filantropi, dan pemerintah daerah untuk memperluas sumber pembiayaan kegiatan budaya. Serta mengembangkan program ekonomi kreatif berbasis budaya, seperti produk UMKM, wisata budaya, dan kuliner tradisional, agar hasilnya dapat menjadi sumber pendanaan mandiri bagi kelompok budaya.

3. Perlu adanya Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme Pengurus, menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi, keuangan, dan pemasaran digital bagi pengurus dan pelaku seni budaya. Meningkatkan kualitas dokumentasi dan promosi kegiatan budaya melalui media sosial, website Kalurahan, dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan promosi budaya lokal.
4. Diperlukan Inovasi Program dan Pelestarian Tradisi, mengembangkan inovasi program yang mengintegrasikan teknologi, seperti digitalisasi arsip budaya, pembuatan konten video edukasi, atau aplikasi wisata budaya. Melestarikan tradisi dan seni yang mulai redup dengan mengadakan festival tematik, lomba kreatif, atau pelatihan khusus yang melibatkan seniman senior dan pemuda.
5. Diharapkan adanya Optimalisasi Regulasi dan Tata Kelola dalam mengevaluasi dan perbarui regulasi Kalurahan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan budaya. Memastikan Pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta sampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.
6. Penguatan Jejaring dan Promosi Eksternal dan membakngun jejaring dengan Kalurahan budaya lain di DIY maupun nasional perlu dilakukan untuk berbagi pengalaman, benchmarking, dan kolaborasi program lintas wilayah, serta mempromosikan potensi budaya Wijirejo melalui event budaya tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional untuk memperluas pengakuan dan peluang pengembangan.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program, baik dari segi pelaksanaan, dampak sosial, maupun ekonomi. Melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi atau lembaga kebudayaan, untuk memberikan masukan obyektif dan rekomendasi pengembangan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, T. P. H. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KALURAHAN BUDAYA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA LOKAL DI KALURAHAN SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN. *Journal Media Wisata*, 16(1), 662–673. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/287573-Implementasi-Kebijakan-Kalurahan-Budaya-Dalam-A1ebe8b6.Pdf>
- Caturharjo-Bantul.Kalurahan.Id. <https://Caturharjo-Bantul.Kalurahan.Id/First/Artikel/998-Penetapan-Rintisan-Kalurahan-Budaya-Tahun-2023>
- Damanik, J., & Teguh, F. (2013). Penguatan Lembakga Kalurahan Budaya: Strategi Pengelolaan dan Pelestarian Nilai Budaya. PT Remaja Rosdakarya Diakses 28/11/2024
- Desem. (2023). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KALURAHAN RINTISAN BUDAYA MENJADI KALURAHAN BUDAYA DI KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL* [Sekolah Tinggi Pembakngunan Masyarakat Kalurahan “APMD” Yogyakarta]. [Http://Repo.Apmid.Ac.Id](http://Repo.Apmid.Ac.Id)
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembakngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Firdaus, M., Winarti, S. E., & Minardi, M. (2023). Pendampingan Kalurahan Gari Menuju Kalurahan Budaya Di Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Diy. *JCOMENT (Journal Of Community Empowerment)*, 4(3), 120–136. <https://Doi.Org/10.55314/Jcoment.V4i3.511>
- Hata. (2023). *“PURBAYAN BERGERAK” Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) Purbayan Menuju Kelurahan Budaya (KB) Oleh Tim Akreditasi Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2023*. Hata.
- Karmadi, A. D. (2007). Budaya lokal sebagai warisan budaya dan upaya pelestariannya [Local culture as cultural heritage and preservation efforts]. Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembakngunan* [Culture, mentality, and development]. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif* (S.Y. Ratri (Ed.);Ke-1 PT Remaja Rosdakarya Diakses 28/11/2024
- Muhammad Rizalul Haq, Mohammad Mustari, Edy Kusniawansyah, M. Z. 1. (2024). *KEBERADAAN BUDAYA RIMPU DI KALURAHAN SANGIA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*,

09(1), 1254–1268. <https://doi.org/10.23969/Jp.V9i1.12833>

Rachma, A. Z., Wila Adi, N., & Al Fikri, H. (2023). Identitas Visual Kalurahan Budaya Pampang Samarinda. *JSRW (Jurnal Senirupa Warna)*, 11(1), 25–42. <https://doi.org/10.36806/Jsrw.V11i1.165>

Satria Wahyu Wijaya. (2024). *Pengembangan Kalurahan Rintisan Budaya Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Di Kalurahan Gading, Playen, Gunungkidul*. [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA]. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46406>

Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Kebijakan* (S.Y. Ratri (Ed.);Ke-1 Alvabeta CV Diakses 28/11/2024

Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kebijakan* (S.Y. Ratri (Ed.);Ke-1 Alvabeta CV Diakses 28/11/2024

Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kebijakan* (S.Y. Ratri (Ed.);Ke-1 Alvabeta CV Diakses 28/11/2024

Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kebijakan* (S.Y. Ratri (Ed.);Ke-1 Alvabeta CV Diakses 28/11/2024

Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi Kebijakan Kalurahan Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Reformasi*, 4(2), 102–110. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/56/53>

Widyadsawitri. (2021). *Keparakan Berjuang Dalam Akreditasi Kelurahan Budaya*. Mergansankek.Jogjakota.Go.Id. <https://mergansankek.jogjakota.go.id/detail/index/15705>

Wijirejo.Bantulkab.Go.Id. (2023). *Wijirejo Ditetapkan Menjadi Kalurahan Rintisan Budaya*. Wijirejo.Bantulkab.Go.Id. <https://wijirejo.bantulkab.go.id/first/artikel/381-wijirejo-ditetapkan-menjadi-kalurahan-rintisan-budaya>

Yusuf, Y., Prayoga, G. I., & Christianingrum, C. (2023). Rintisan Kalurahan Wisata Budaya Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Dan Pemanfaatan Digital Marketing. *Journal On Education*, 6(1), 8557–8565. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4296%0Ahttps://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4296/3514>

Undang-Undang:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa atau Kelurahan Budaya
4. Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kelurahan
5. Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kelurahan Mandiri Budaya
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan

Website

Bpk.go.id/Home/Details/22088/2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PROGRAM STUDI ILMU BAHASA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK DEKAL
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK DEKAL

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ag.id, e-mail : info@apmd.ag.id

SURAT TUGAS
Nomor : 144/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Sri Ayu Magi Talo
Nomor Mahasiswa : 21520046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.

a. Tempat : Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Pemerintahan Desa dalam Mengembangkan Desa Rintisan Budaya
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 25 April 2025



Ketua
[Signature]
Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Tugas



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
KALURAHAN WIJIREJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦮꦶꦗꦶꦫꦺꦴ

Jl. Jodog – Sedayu Km.1 Wijirejo Pandak Bantul Telp : 0274-367004
Kode Pos 55761 Website : <https://wijirejo.bantulkab.go.id>
Email : desa.wijirejo@bantulkab.go.id

No : 000.9/ 57
Lamp :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Sdri Sri Ayu Magi Talo
Di APMD Yogyakarta

Dengan hormat

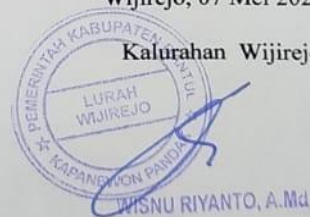
Menindaklanjuti surat dari STPMD “ APMD “ Yogyakarta Program Studi Ilmu Pemerintahan nomor : 238/I/U/2025 tentang permohonan izin Penelitian saudara **Sri Ayu Magi Talo** yang akan dilaksanakan selama 1 bulan tentang penelitian dalam kemampuan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Dengan ini Pemerintah Kalurahan Wijirejo **mengizinkan pelaksanaan Penelitian** kepada nama tersebut diatas di Kalurahan Wijirejo, dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban dan ketentrman masyarakat di lokasi penelitian.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wijirejo, 07 Mei 2025

Kalurahan Wijirejo



Surat Balasan dari Pemerintah Kalurahan Wijirejo



Wawancara dengan Bapak Heri Sujoko, selaku Kaur Dinarta Kalurahan
Wijirejo sekaligus pengurus rintisan budaya di kalurahan wijirejo



Wawancara dengan Bapak Edi Rianto, selaku Ketua Dewan Budaya
Kalurahan Wijirejo



Wawancara dengan Bapak Bintoro, selaku Kasih Ulu-Ulu di Kalurahan
Wijirejo



wawancara dengan Bapak Wisnu Rianto selaku Lurah di Kalurahan
Wijirejo



Wawancara dengan Bapak Bapak Muji Lestari selaku Ketua Banmuskal
Wijirejo sekaligus pengurus rintisan budaya di Kalurahan Wijirejo



wawancara dengan Ibu Rini Aliah selaku Tokoh Masyarakat di Kalurahan
Wijirejo

